

**LAPORAN BULANAN PUSAT KERJA SAMA LUAR NEGERI  
PERIODE AGUSTUS 2015  
PUSAT KERJA SAMA LUAR NEGERI**

No	Tanggal/Tempat	Kegiatan	Pihak yang Terlibat	Hasil dan Keputusan	Tindak Lanjut
<b>KERJASAMA BILATERAL</b>					
1.	30 Juli 2015 Kementerian Luar Negeri.	Persiapan Kunjungan Menlu Kolombia dan Penyelenggaraan SKB ke-2 RI – Kolombia.	Kementerian/ Lembaga terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan SKB ke-2 RI – Kolombia di Indonesia pada tanggal 14 September 2015.</li> <li>2. Permintaan pihak Kolombia kepada Indonesia untuk tim inspeksi terkait dengan rencana importasi daging dari Kolombia. Pusat KLN sudah mengkoordinasikan permintaan tersebut dengan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, namun belum dapat masukan.</li> <li>3. Permintaan dari pihak Kolombia untuk expert perkebunan kelapa sawit. Isu tersebut juga telah disampaikan kepada Ditjen Perkebunan, namun belum ada jawaban.</li> </ol>	Kemlu akan mengadakan rapat khusus pembahasan permintaan expert kelapa sawit untuk dikirim ke Kolombia.
2	3 Agustus 2015 Hotel Amaroso Bogor	Rapat persiapan Kunjungan Presiden Mesir Abdul Fattah el sisi ke Indonesia Atas undangan Kemenlu	Seluruh Kementerian terkait, BKPM, KADIN dan swasta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Mesir melalui kedubes Mesir di Jakarta telah menyampaikan usulan rencana kunjungan resmi Abdel Fattah Al Sisi, Presiden Mesir ke Indonesia pada 4-6 September 2015.</li> <li>2. Pokok kegiatan kunjungan tersebut yaitu; bisnis meeting dan penandatanganan MoU kerjasama di berbagai bidang.</li> <li>3. Kementerian pertanian saat ini memiliki dua MoU kerjasama dengan Pemerintah Mesir yaitu di bidang pertanian dan perkarantinaan. MoU tersebut telah habis masa berlakunya dan akan</li> </ol>	Pusat KLN memberikan masukan butir wicara presiden berupa usulan peningkatan kerjasama di bidang pertanian diantaranya kegiatan joint research di bidang perkapasan dan capacity building untuk para petani & penyuluh di kedua Negara.

				diperpanjang, namun hingga saat ini Pemerintah Mesir belum dapat melakukan forum bilateral sesuai tentative yang dijadwalkan. Sehingga pada saat kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia Kementan tidak dapat melakukan penandatanganan MoU kerjasama pertanian dengan Mesir.	
3.	3-4 Agustus 2015 BB Biogen, Bogor	Pembahasan Persiapan Kunjungan Delegasi <i>Diagnostic Mission</i> Argentina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat KLN</li> <li>• SesDitjen Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>• SesBadan Litbang Pertanian</li> <li>• BIB Lembang</li> <li>• BBPP Lembang</li> <li>• BPTP Lembang</li> <li>• Direktorat Kerjasama Teknik, Kemlu</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai tindak lanjut <i>Agreement on Technical Cooperation</i> antara Indonesia dan Argentina, masing-masing negara telah menawarkan area-area kerjasama yang potensial.</li> <li>2. Indonesia telah memilih 4 sektor kerjasama yang ditawarkan oleh Argentina yaitu <i>ship waste disposal inspection, dairy cattle production, post harvest management</i> dan <i>exchange of flagship social programs (poverty reduction, universal children allowance)</i></li> <li>3. Pihak Argentina telah siap mengirimkan delegasi untuk melakukan <i>diagnostic mission</i> ke Indonesia selama 7 (tujuh) hari guna mengidentifikasi sektor-sektor kerja sama yang dapat dikolaborasikan antara RI-Argentina. Delegasi tersebut akan terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 <i>Senior officials from the cooperation area of Foreign Affairs Ministry</i></li> <li>- 1 <i>Director of International Relations-Agriculture Ministry</i></li> <li>- 1 <i>Expert on dairy cattle production from the Argentinean Institute for Agriculture Technology (INTA)</i> beserta 2 staf</li> </ul> </li> </ol>	Kemlu akan mengadakan rapat koordinasi lanjutan dan akan melakukan kunjungan pendahuluan ke masing-masing balai yang akan dikunjungi.

				<p>4. Delegasi Argentina direncanakan akan berkunjung ke Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2015 – 5 September 2015 dengan fokus lokasi kunjungan di sekitar Jakarta dan Jawa Barat.</p> <p>5. Terkait bidang pertanian, lokasi yang direncanakan akan dikunjungi yaitu BBIB Lembang, BBPP Lembang dan BPTP Lembang dengan waktu kunjungan pada tanggal 4 September 2015.</p> <p>6. Disampaikan bahwa Argentina selama ini mendukung Indonesia dalam penerapan aturan-aturan perdagangan, dan perlu diantisipasi jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait importasi daging karena selama ini Argentina berkeinginan untuk ekspor daging ke Indonesia.</p> <p>7. Perwakilan Direktorat KST, Kemlu, menyampaikan bahwa Direktorat Amselkar, Kemlu telah mengundang Dubes Argentina ke Kupang, NTT untuk melihat peternakan sapi disana dan sekiranya memungkinkan agar delegasi Argentina yang nantinya datang bisa diajak kesana. Selain itu juga disampaikan bahwa kunjungan delegasi Argentina adalah untuk menindaklanjuti <i>MOU on technical Cooperation</i> Indonesia-Argentina dengan fokus kerjasama pertanian pada 2 area kerjasama yaitu <i>dairy cattle production</i> dan <i>post harvest management</i> serta kemungkinan bidang kerjasama pertanian lainnya. Adapun tujuan kunjungan tersebut adalah untuk mengetahui kapasitas Indonesia di bidang pertanian</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>8. Terkait lokasi kunjungan perlu ditanyakan kembali ke pihak Argentina apakah yang ingin dikunjungi adalah institusi milik pemerintah atau swasta. Ditawarkan apabila ingin ke swasta bisa ke Cimori, KSPBU, BPTSP &amp; HMT Cikole ataupun PT. Ultrajaya</p> <p>9. Perwakilan dari BIB Lembang menyampaikan bahwa BIB lembang tidak hanya memproduksi semen beku untuk sapi pedaging, tapi juga semen beku sapi perah. Kapasitas produksinya 2 juta dosis/ tahun. BIB Lembang sudah mengeksport semen beku ke Malaysia dan saat ini sedang melakukan penjajagan dengan Nigeria.</p> <p>10. Terkait <i>Focus Group Discussion</i> yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2015 di Kementerian Luar Negeri, pihak Kemlu menyampaikan bahwa pelaksanaannya akan dibagi per sesi dan diharapkan masing-masing sesi dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II</p> <p>11. Pihak Kemenlu mengharapkan agar bahan-bahan untuk pelaksanaan FGD dapat segera disampaikan ke Kemenlu untuk diterjemahkan ke dalam Bahasa Spanyol. Pihak Kemenlu juga menyampaikan bahwa akan melakukan kunjungan pendahuluan ke Lembang dan akan mengadakan rapat koordinasi lanjutan sebelum kunjungan Delegasi Argentina dimaksud.</p> <p>12. Terkait agenda pelaksanaan disampaikan bahwa pada tanggal 4 September 2015, akan dilaksanakan pertemuan di BBPP Lembang pada pagi harinya, dan pada siang harinya baru dilakukan field visit ke masing-masing balai.</p>	
--	--	--	--	---	--

4	4 Agustus 2015 Ditjen Perkebunan Kementan	Rapat rencana sosialisasi Indonesian Sustainable Palm Oil / ISPO	Ditjen Perkebunan, PPKS, DMSI, GAPKI, APROBI, ALSI, PT Wilmar, PT Musim Mas Group, PT Asian Agri, PT Sinar Mas	<p>1. Kegiatan Sosialisasi ISPO akan dilaksanakan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tanggal 12-18 September 2015 di Belanda dan Belgia</li> <li>• tanggal 27 September 2015 di Indoa dan 16-21 Oktober 2015 di Jerman.</li> </ul> <p>2. Indonesia mengharapkan pengakuan ISPO oleh Komisi Eropa khususnya dalam mengcounter NGO yang selama ini menentang keras pengembangan kelapa sawit Indonesia. Acara akan diseting menjadi sebuah diskusi dua arah yang terbuka (tidak defensif)</p> <p>3. Beberapa nara sumber yang akan menjadi presenter berasal dari Komite ISPO, PPKS, GAPKI, APROBI dan ALSI.</p>	Ditjen Perkebunan akan mengadakan rapat perispan lanjutan dalam waktu dekat
5	8 Agustus 2015 Hotel Salak Bogor	Menghadiri <i>Roundtable Discussion</i> Persiapan <i>Senior Official Meeting</i> (SOM) Scorecard antara RI – Timor Leste	Seluruh Kementerian dan Lembaga terkait	<p>1. Tujuan rapat adalah untuk menyusun scorecard pada SOM RI-Timor Leste yang dilaksanakan pada tanggal 12-13 Agustus di Dili, Timor Leste dan persiapan kunjunagn PM Timor Leste ke Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2015.</p> <p>2. Rapat dipimpin oleh Kasubdit Direktorat Asia Timur dan Pasifik Ibu <i>Andalusia</i> Tribuana Tungga Dewi dan dihadiri oleh Kementerian dan Lembaga terkait serta perwakilan dari Kedutaan Besar Timor Leste di Jakarta.</p> <p>3. Pertemuan terbagi menjadi beberapa sesi sesuai dengan working group yang ada, yaitu:</p> <p style="margin-left: 40px;"><i>a. Working Group on Agriculture, Forestry and Fisheries</i></p>	

				<p>b. <i>Working Group on Transport, Telecommunication and Public Works</i></p> <p>c. <i>Working Group on Legal Matters and Judicial Issues</i></p> <p>d. <i>Working Group on Trade, Investment and Finance</i></p> <p>e. <i>Working Group on Social, Education and Culture</i></p> <p>f. <i>Working Group on Border Issues</i></p> <p>4. Untuk <i>Working Group on Agriculture, Forestry and Fisheries</i>, Pusat KLN menyampaikan bahwa saat ini MoU bidang pertanian yang telah ditandatangani pada tahun 2008 telah berakhir masa berlakunya pada tahun 2013. TERkait dengan hal tersebut, Indonesia telah mengirimkan draft MoU pembaruan dan menunggu tanggapan dari pihak Timor Leste.</p> <p>5. Kementerian Pertanian RI berinisiasi untuk memfinalisasi draft MoU pembaruan dan melaksanakan pertemuan Hoint Agriculture Working Group (JAWG) pertama di Yogyakarta tanggal 21-22 Agustus 2015. Pusat KLN meminta kesediaan Kementerian Luar Negeeri untuk menyampaikan hal dimaksud ke pihak Timur Leste mengingat pada SOM di Dili, Kementan RI tidak dapat mengirimkan delegasi.</p> <p>6. Selain hal itu ada beberapa isu yang terkait dengan bidang perkarantinaan di bawah <i>Working Group on Border Issues</i></p>	
--	--	--	--	---	--

6	10 Agustus 2015 Kementerian Pertanian	Rapat Persiapan Pengiriman Petani Muda Indonesia Ke Jepang	Badan PPSDMP, Mizuho, Pusat KLN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat dipimpin oleh Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, Badan PPSDMP dan dihadiri oleh perwakilan dari Mizuho dan Pusat KLN.</li> <li>2. Pihak Mizuho menyampaikan keinginannya untuk mengirimkan petani muda Indonesia ke Jepang. Direncanakan pengiriman dimaksud akan dimulai bulan September 2015 dengan periode 3 tahun di Jepang.</li> <li>3. Pihak Mizuho sebelumnya telah mengirimkan 5 petani asal Bali yang bekerja sama dengan modern group di Indonesia. Sebelumnya pihak Mizuho telah melakukan survey ke daerah Ciwidei Jawa Barat untuk mengetahui kondisi cuaca, tanah dan air. Karena hal ini nantinya terkait dengan pengembangan budidaya sayur dan buah yang akan dilakukan di Indonesia.</li> <li>4. Disampaikan bahwa petani yang akan mengikuti kegiatan magang akan mendapatkan gaji sekitar 170.000 Yen termasuk biaya asuransi dan tempat tinggal sehingga setiap petani akan mendapatkan pendapatan bersih sekitar 120.000 Yen per bulan. Adapun biaya penerbangan pulang pergi akan ditanggung oleh perusahaan penerima. Menurut Badan PPSDMP standar gaji dimaksud termasuk paling tinggi jika dibandingkan dengan kegiatan magang sebelumnya.</li> <li>5. Syarat-syarat yang diminta oleh pihak Mizuho antara lain petani dengan rentang umur 25-32 tahun. Namun demikian Badan PPSDMP menyampaikan bahwa calon petani yang memenuhi kualifikasi berumur sekitar 20-22</li> </ol>	Berkoordinasi lebih lanjut dengan Badan PPSDMP
---	---	---	------------------------------------	---	--

				<p>tahun mengingat petani tersebut merupakan luusan dari sekolah pertanian setingkat SMA. Pihak Mizuho tidak berkeberatan dan akan ikut menyeleksi melalui teleconference. Pihak Mizuho juga tidak mempersyaratkan jenis kelamin dari calon petani magang.</p> <p>6. Badan PPSDMP menyatakan kesanggupannya untuk menyeleksi dan selanjutnya akan dipersiapkan pelatihan sebelum pemberangkatan.</p>	
7.	10 Agustus 2015 Kementerian Luar Negeri	Pembahasan rencana Kunjungan Menlu Lithuania ke Indonesia, 28 Agustus 2015 dan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Bilateral (FKB) III RI – Serbia, September 2015.	Kementerian/ Lembaga	<p><b>Kunjungan Menlu Lithuania ke Indonesia</b></p> <p>1. Menteri Luar Negeri Lithuania, Y.M. Linas Linkevicius, direncanakan akan berkunjung ke Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2015. Pada kunjungannya yang pertama kali ini, Menlu Lithuania akan membahas berbagai perkembangan kerja sama bilateral, baik dibidang politik, perdagangan, pertanian, industri, pariwisata, pendidikan, sosial dan budaya. Menlu Lithuania akan tiba di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2015 di Jakarta, kemudian akan melakukan pertemuan dengan Menlu RI dan beberapa pejabat tinggi negara/pemerintah pada tanggal 27-28 Agustus 2015. Menlu Lithuania akan kembali Lithuania pada tanggal 28 Agustus 2015 sore hari.</p> <p>2. Disamping melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri RI, Menlu Lithuania juga berkeinginan untuk bertemu dengan beberapa pejabat tinggi negara/pemerintahan di Indonesia seperti Ketua DPR, Kadin, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, dan Gubernur Provinsi DKI.</p>	



			<p>3. Adapun agenda yang akan dibawa oleh Menlu Lithuania adalah pembahasan peluang ekspor daging sapi halal dari Lithuania ke Indonesia.</p> <p>4. Terkait dengan keinginan Menlu Lithuania bertemu dengan Mentan, kami sampaikan bahwa hal tersebut telah kami laporkan kepada Bapak Menteri Pertanian. Untuk selanjutnya, Pusat KLN akan menginformasikan ke Kemlu setelah menerima arahan dari Bapak Menteri.</p> <p><b>Forum Konsultasi Bilateral (FKB) III RI – Serbia</b></p> <p>1. FKB III RI – Serbia akan dilaksanakan pada tanggal 8-9 September 2015 di Beograd, Serbia. FKB akan membahas perkembangan hubungan bilateral RI – Serbia, baik dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.</p> <p>2. Kami sampaikan juga bahwa kerja sama bidang pertanian antara Indonesia dan Serbia saat ini belum intensif, dikarenakan belum terbentuknya forum kerja sama bidang pertanian antar kedua negara. Kami mengusulkan untuk dibentuk forum kerja sama bidang pertanian kedua negara, dengan terlebih dahulu menginisiasi pengusulan MOU on Agriculture RI – Serbia.</p> <p>3. Masukan tersebut ditanggapi oleh Kemlu dengan meminta proposal/draft MOU dari Kementan untuk disampaikan pada saat FKB III RI – Serbia dilaksanakan. Adapun bidang kerja sama yang sangat penting dilakukan dengan pihak Serbia adalah peternakan, hortikultura, penelitian dan <i>capacity building</i>.</p>	
--	--	--	---	--

				4. Terkait dengan rencana inisiasi pembentukan MOU on Agriculture RI – Serbia, hal itu dapat juga disampaikan pada saat pertemuan atau kunjungan <i>the Charge d’Affaires of Embassy of the Republic of Srbije</i> kepada Bapak Kapus KLN pada tanggal 18 Agustus 2015 di Kementan.	
8.	11 Agustus 2015 di Bappenas	Persiapan Senior Official Meeting (SOM) Indonesia – Australia 2015	Kemenkeu, Kemenlu, Kantor Setwapres, Kementerian Setneg, Kemen PU, Kemendikbud, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, BKPM, BNPB, Kementan dan Kedutaan Besar Australia di Jakarta.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas dan dihadiri oleh perwakilan dari</li> <li>2. Rapat membahas draft Aid Investment Plan dan draft Agenda <i>Senior Official Meeting (SOM) Indonesia – Australia 2015</i></li> <li>3. Pimpinan pertemuan menyampaikan bahwa pertemuan tahunan <i>Senior Official Meeting (SOM)</i> direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2015 di Lombok, NTB. Setelah acara SOM akan dilakukan kunjungan lapangan meninjau salah satu proyek PRIM (Provincial Road Improvement and Maintenance) yang mendapat dana hibah dari Pemerintah Australia. Salah satu agenda yang akan dibahas adalah refleksi bantuan Australia selama 2010-2015. Dalam hal ini Kementerian/Lembaga terkait dapat menyampaikan apakah programnya perlu dilanjutkan atau tidak mengingat bantuan hibah Australia ke Indonesia mengalami penurunan sebesar 40%. Minggu depan juga akan diadakan pertemuan Pre-SOM yang akan dipimpin oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dengan mengundang pihak Pemerintah Australia.</li> </ol>	

				<p>4. Selain itu pimpinan pertemuan juga menjelaskan mengenai draft Aid Investment Plan (AIP) 2015-2019 disesuaikan dengan isi dari RPJMN 2015-2019. Hal ini juga akan dibahas dalam pertemuan SOM. Dalam draft AIP disebutkan tiga (3) bidang yang akan menjadi prioritas investasi Pemerintah Australia yaitu bidang ekonomi governance, infrastruktur, dan sosial dengan fokus di daerah miskin di wilayah Indonesia Bagian Timur.</p> <p>5. Kementerian terkait dan Direktorat di Bappenas dapat menyampaikan berbagai <i>update</i> program <i>on-going</i> maupun status inisiatif baru serta tanggapan/usulan atas draft AIP untuk menjadi pertimbangan dalam agenda pertemuan SOM 2015.</p>	
9.	11-12 Agustus 2015 di Makassar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan <i>the 13<sup>th</sup> Task Force Meeting for Promoting Vegetables and Fruit Exports from Indonesia to Singapore</i></li> <li>• Pertemuan <i>the 11<sup>th</sup> Indonesia-Singapore Agribusiness Working Group (AWG)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Perdagangan</li> <li>• Kemenko Bidang Perekonomian</li> <li>• Kementerian Perhubungan</li> <li>• Ditjen PPHP</li> <li>• Ditjen Hortikultura</li> <li>• Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>• Pusat KLN</li> <li>• Dinas Pertanian Propinsi Lampung</li> <li>• Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Selatan</li> <li>• Delegasi Singapore</li> </ul>	<p>Hasil Pertemuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertemuan <i>Agriculture Working Group (AWG)</i>, menghasilkan <i>action plan</i> dari tiap <i>Sub Working Group (SWG)</i> yang berisi berbagai kegiatan atau program yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor sayur, buah, dan produk perikanan. AWG tersebut terdiri dari 5 SWG yaitu: a) <i>Fish and Fishery Products</i>; b) <i>Vegetables and Fruits</i>; c) <i>Logistics and Infrastructure</i>; d) <i>Sanitary and Phytosanitary (SPS) Standards, Import and Export Requirements</i>; e) <i>Promotion, Marketing and Investment</i>.</li> <li>2. Pertemuan ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan Para Pemimpin Negara di Singapura pada bulan Juli 2015 dalam meningkatkan kerja sama perekonomian.</li> </ol>	<p>Hasil Task Force <i>Meeting for Promoting Vegetables and Fruit Exports from Indonesia to Singapore</i> akan dilaporkan setiap 6 bulan sekali.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para Pelaku Usaha Indonesia</li> <li>• Para Pelaku Usaha Singapore</li> </ul>	<p>3. Sejak implementasi 2010, kinerja buah dan sayuran Indonesia ke Singapura cenderung fluktuatif. Berdasarkan informasi dari AVA, sejak tahun 2011 – 2013 ekspor sayur Indonesia ke Singapura mengalami peningkatan sebesar 18,19%. Untuk periode Januari – Juni 2015, ekspor sayur ke Singapura mencapai 11.764 ton atau meningkat 16% dibandingkan dengan periode tahun 2014. Sedangkan untuk ekspor buah, pada tahun 2011 – 2013 mengalami penurunan sebesar 13,91%, dan untuk periode Januari – Juni 2015 mencapai 943 ton atau meningkat 35% dibandingkan dengan tahun 2014.</p> <p>4. Kedua negara menyadari kendala yang perlu segera diatasi adalah masalah logistik yaitu kargo udara yang relatif mahal dan belum mencapai pada sentra-sentra produksi.</p> <p>5. Perwakilan dari Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa telah terjadi peningkatan interkonektifitas baik ke Singapura maupun antar wilayah Indonesia yang seharusnya bisa diintensifkan pemanfaatannya.</p> <p>6. Pertemuan AWG mengusulkan agar fasilitas transportasi laut menjadi prioritas dalam kerja sama dalam <i>“Working Group on Transportation”</i>. Mengingat biaya transportasi laut lebih murah dibandingkan transportasi udara, sehingga produk Indonesia dapat berkompetisi.</p> <p>7. Pertemuan juga menginformasikan bahwa terdapat beberapa perusahaan daging olahan unggas Indonesia (berupa nugget, karage, sosis ayam) ke pasar Singapura yang mendapat</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>sambutan positif dari Singapura. Calon eksportir Indonesia perlu segera memenuhi persyaratan keamanan pangan yang diperlukan.</p> <p>8. Kedua belah pihak telah menyepakati penyesuaian SWG yaitu <i>SWG on Agriculture; SWG on Fish and Fisheries Products; SWG on Standards, Import and Export Requirements</i>. Pertemuan diusulkan akan dilaksanakan setahun sekali.</p> <p>9. Untuk pertemuan <i>Task Force</i> yang melibatkan pelaku usaha agribisnis kedua negara, dapat dilaksanakan lebih dari satu kali dalam setahun disesuaikan dengan kebutuhan.</p> <p>10. Pertemuan AWG selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2016 di di Singapura.</p>	
10.	12 Agustus 2015 Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.	Dalam rangka Kunjungan Usulan Proposal Proyek baru kerja sama dengan Taiwan	Pusat KLN, Sekretaris Ditjen Hortikultura, Direktorat Hortikultura, Kementan dan Tim dari Taiwan Technical Mission,	<p>1. Wakil dari Pusat KLN dan Sekretaris Ditjen Hortikultura bersama – sama dengan Tim dari TTM berkunjung ke calon lokasi pengembangan buah naga di Kabupaten Pandeglang yaitu di Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Induk Mengger seluas 4 hektar dan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Induk Kaung Caang seluas 1 hektar. Kedua lokasi ini dianggap memadai selain lokasinya layak karena memiliki lahan yang relatif datar juga secara agronomis memenuhi syarat.</p> <p>2. Wakil dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pandeglang menjelaskan bahwa Di Kabupaten Pandeglang, usahatani buah naga mulai diusahakan sejak tahun 2012 dan hingga saat ini telah berkembang dengan baik. Wilayah pengembangan usahatani buah naga terdapat</p>	Pihak TTM masih akan berkonsultasi dengan TETO guna membicarakan 2 proposal dimaksud. Akan diadakan pertemuan lanjutan guna membahas lebih lanjut kegiatan tersebut.

				<p>di beberapa kecamatan antara lain: Kecamatan Kaduhejo dan Kecamatan Koroncong. Keadaan iklim di Kabupaten Pandeglang juga sangat mendukung pembudidayaannya. Jenis buah naga yang dibudidayakan di Kabupaten Pandeglang yaitu jenis buah naga berdaging merah (<i>Super Red</i>).</p> <p>3. Pengembangan buah naga di Kabupaten Pandeglang masih tergolong baru dan daerah pengembangannya juga masih terbatas. Faktor utama yang menghambat pengembangan buah naga di Kabupaten Pandeglang adalah biaya produksi yang tinggi terutama pada saat persiapan lahan sampai pada persiapan tanam. Apalagi jika tiang pancangnya dibuat secara permanen. Selain itu, dalam pengembangan buah.</p>	
11.	13 Agustus 2015 Kementerian Perdagangan	Rapat persiapan pertemuan ke-7 <i>Working Group on Trade and Investment (WGTI) Indonesia – Uni Eropa</i>	Kementerian/ Lembaga Pemerintah	<p><b>Scoping Paper IEU CEPA</b></p> <p>1. <i>Scoping paper</i> merupakan pembahasan isu hambatan perdagangan kedua negara. Pihak Uni Eropa telah menyampaikan permintaan untuk menghapus atau mengurangi hambatan perdagangan yang ada di Indonesia, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Liberalisasi terhadap 95% pos tarif</li> <li>Penghapusan bea keluar (<i>export duties</i>)</li> <li>Persaingan usaha</li> <li>Perdagangan dan pembangunan yang berkelanjutan</li> <li>Pengadaan barang dan jasa pemerintah</li> <li>Animal Welfare</li> <li>Perdagangan jasa dan investasi</li> </ol>	

				<p>2. Beberapa usulan dari pihak Uni Eropa terhadap pembukaan hambatan perdagangan di Indonesia tidak dapat dipenuhi, seperti penghapusan bea keluar, persaingan usaha (hak khusus pada BUMN), dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal tersebut bertentangan dengan undang-undang dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Terlampir kami sampaikan <i>draft scoping paper</i> dimaksud.</p> <p><b>Penyusunan masukan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah</b></p> <p>1. Pokok bahasan ini dibedakan menjadi 2 bagian yaitu: 1) masukan untuk kepentingan Indonesia dan 2) tanggapan dari masing-masing Kementerian/Lembaga Pemerintah atas permintaan pihak Uni Eropa.</p> <p>2. Untuk isu pertanian, yang menjadi <i>concern</i> Indonesia adalah :</p> <p>a. <i>Minimum level on the cadmium on cocoa powder and chocolate</i></p> <p>b. <i>Update on regulation concerning Antraquinone on tea product</i></p> <p>c. <i>Update of regulation on Pesticide and endocrine disruptors to all agriculture and industrial products.</i></p> <p>d. <i>Update of regulation on caffeine content for agricultural products</i></p> <p>e. <i>Update of regulation on natural and organic commodities</i></p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>f. <i>Update of regulation on Aflatoxin for nutmeg.</i></p> <p>3. Pada prinsipnya Indonesia meminta penjelasan lebih lanjut terkait regulasi yang dikeluarkan oleh beberapa negara Uni Eropa dan mengantisipasi dampak penurunan nilai ekspor produk pertanian ke Uni Eropa. Terlampir kami sampaikan matriks usulan Indonesia.</p> <p>4. Sementara yang menjadi <i>concern</i> pihak Uni Eropa untuk isu pertanian adalah:</p> <p>a. Daftar investasi negatif (<i>the negative investment list</i>) diantaranya yaitu Permentan tentang Investasi bidang hortikultura. Pada UU tersebut mewajibkan untuk divestasi perusahaan asing oleh perusahaan nasional setelah jangka waktu 4 tahun. Masalah yang dihadapi dalam hal divestasi adalah kemampuan modal dari perusahaan nasional dalam membeli perusahaan asing tersebut. Pihak Uni Eropa mempertanyakan konsistensi pemberlakuan permentan dimaksud. Namun saat ini, Permentan tersebut sedang dalam tahap pembahasan di DPR.</p> <p>b. <i>Import restrictions for animal and animal products as well horticultural and fresh plant products (licensing; quantitative restrictions based on the Food Law 2012; animal health law 18/2009, horticultural law 13/2012; regulation on imports of fresh food of plant origin No. 4/2015; regulation 139/2014 on restrictions on meat and meat products regulation 139/2014).</i></p>	
--	--	--	--	---	--



				<p>c. <i>Notification G/SPS/N/IDN/95 concerning import restriction on live poultry and poultry products from certain member states.</i></p> <p>d. <i>Entry port restrictions for horticultural products.</i></p>	
12.	13 Agustus 2015 di Kota Tangerang, Provinsi Banten	Dalam rangka Kunjungan Usulan Proposal Proyek baru kerja sama dengan Taiwan	PKLN, Sekretaris Ditjen Hortikultura, Kementan dan Tim dari Taiwan Technical Mission,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil dari Pusat KLN dan Sekretaris Ditjen Hortikultura bersama – sama dengan Tim dari TTM berkunjung ke beberapa pengusaha anggrek di wilayah kota Tangerang. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kondisi terkini usaha pengembangan anggrek di kota Tangerang.</li> <li>2. Salah satu usaha yang dikunjungi yaitu usaha yang dimiliki oleh Bapak Nugroho yang mempunyai luas lahan 1 ha. Usaha ini telah dimulai sejak tahun 1980. Kegiatan pemasaran anggrek jenis dendrobium dilakukan ke wilayah Jakarta, Bengkulu dan Lampung. Benih anggrek diperoleh dari Bangkok. Kegiatan pemupukan dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari. Pemberian pestisida hanya dilakukan jika timbul hama penyakit.</li> <li>3. Usaha kedua yang dikunjungi adalah kebun anggrek milik Pak Tono. Dikebun ini mengembangkan jenis anggrek yang lain yaitu anggrek panda, jenis anggrek panda ditanam dengan cara digantung, tidak memiliki media tanam sehingga akarnya bergantung, disiram 3 kali sehari (pagi, siang, sore). Benih anggrek ini diimpor dari Bangkok, Thailand. Anggrek panda hanya membutuhkan waktu 4 jam di pesawat dari Bangkok ke Jakarta, setelah anggrek ini berbunga bisa mekar sampai 1,5 bulan.</li> </ol>	

				<p>4. Setelah melihat beberapa usaha anggrek kunjungan dilanjutkan dengan melihat Calon lahan pengembangan anggrek kerja sama dengan TTM. Lokasi yang dikunjungi adalah tanah hibah Perumahan Bumi Serpong Damai yang luasnya sekitar 11 Ha, dihibahkan ke Dinas Pertanian Kota Tangerang Selatan seluas 6 Ha, dan dihibahkan ke TNI seluas 5 Ha. Rencananya lahan ini akan dijadikan taman kota dengan pengembangan pertanian terpadu. Lahan ini masih berupa hamparan tanah, sudah dibuat sebuah danau yang dijadikan penampungan air.</p> <p>5. Calon lahan I yang dikunjungi adalah tanah hibah BSD yang luasnya sekitar 11 Ha, dihibahkan ke Dinas Pertanian Kota Tangerang Selatan seluas 6 Ha, dan dihibahkan ke TNI seluas 5 Ha. Rencananya lahan ini akan dijadikan taman kota dengan pengembangan pertanian terpadu. Lahan ini masih berupa hamparan tanah, sudah dibuat berupa danau yang dijadikan bendungan air.</p> <p>6. Calon lahan ke II yang dikunjungi adalah Balai Pengembangan Pertanian, lokasi ini adalah hibah Pemerintah Daerah ke Dinas Pertanian Kota Tangerang Selatan. Luas sekitar 2 Ha, ditempat ini sudah dibangun kantor, labolatorium mini, screen house, taman kota serta pengembangan dari Kementerian Perikanan berupa budidaya lele. Lahan ini sudah pernah dikembangkan oleh Dinas Pertanian Kota Tangerang Selatan tapi beberapa waktu terakhir tidak ada lagi yang serius mengembangkan lahan ini, kami sangat berharap Tim dari Taiwan Technical Mission</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>(TTM) mau bekerjasama membangun lokasi ini. Kebun kedua yang dikunjungi adalah kebun anggrek milik pak Tono. Dikebun ini mengembangkan jenis anggrek yang lain yaitu anggrek panda, jenis anggrek panda ditanam dengan cara digantung, tidak memiliki media tanam sehingga akarnya bergantung, disiram 3 kali sehari (pagi, siang, sore). Benih anggrek ini impor dari Bangkok, Thailand. Anggrek panda hanya membutuhkan waktu 4 jam di pesawat dari Bangkok ke Jakarta, setelah anggrek ini berbunga bisa mekar sampai 1,5 bulan.</p>	
13.	19 Agustus 2015, di Bogor	<i>The 1<sup>st</sup> Joint Agricultural Working Group (JAWG) Indonesia – Timor-Leste</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Karantina Pertanian</li> <li>• Ditjen PPHP</li> <li>• Ditjen Hortikultura</li> <li>• Ditjen Perkebunan</li> <li>• Ditjen Tanaman Pangan</li> <li>• Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian</li> <li>• Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan</li> <li>• Pusat KLN</li> <li>• Kementerian Luar Negeri</li> <li>• Institut Pertanian Bogor</li> <li>• Universitas Brawijaya</li> <li>• Delegasi Timor-Leste</li> </ul>	<p>Hasil Pertemuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>MoU on Agriculture</i> telah habis masa berlakunya pada tahun 2013. Pihak Indonesia dan Timor-Leste sepakat untuk memperbarui MoU dimaksud.</li> <li>2. Pertemuan JAWG membahas mengenai finalisasi pembaruan <i>draft</i> MoU bidang pertanian serta identifikasi kerja sama di masa mendatang.</li> <li>3. Pertemuan telah menyelesaikan <i>draft</i> MoU dan kedua belah pihak berkomitmen untuk melanjutkan secara hukum sesuai dengan peraturan masing-masing negara, sebelum penandatanganan MoU oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Menteri Pertanian dan Perikanan Republik Demokratik Timor-Leste.</li> <li>4. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan sejumlah kerja sama teknis dalam bentuk penyediaan input pertanian tersertifikasi seperti benih, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian; pelatihan bagi petugas pertanian dan petani Timor-Leste dalam bidang peningkatan</li> </ol>	<p>Penandatanganan <i>MoU on Agriculture</i> direncanakan akan dilaksanakan pada saat kunjungan Perdana Menteri Timor-Leste ke Indonesia pada tanggal 24-26 Agustus 2015.</p>

				<p>produktivitas komoditas pertanian, produksi benih, pemeliharaan dan pengelolaan mesin pertanian, penanganan pasca panen dan pengolahan untuk mengurangi <i>harvest losses</i>.</p> <p>5. Pihak Indonesia me-review hasil <i>the 8<sup>th</sup> SOM Scorecard of the Joint Ministerial Commission on Bilateral Cooperation between Indonesia and Timor-Leste</i>, yang telah dilaksanakan pada tanggal 12-13 Agustus 2015 di Dili, khususnya terkait dengan kepentingan Timor-Leste untuk melakukan ekspor ternak hidup ke Indonesia, termasuk kerja sama baru dalam kegiatan <i>capacity building</i> untuk pengembangan kopi dan kakao, dibawah perbaruan MoU bidang pertanian.</p> <p>6. Kedua belah pihak sepakat untuk merevisi matriks dan <i>Record of Discussion Working Group on Agriculture, Fisheries and Forestry</i> dalam pertemuan <i>the 8<sup>th</sup> SOM Scorecard of the Joint Ministerial Commission on Bilateral Cooperation between Indonesia and Timor-Leste</i>, khususnya istilah "<i>informal meeting on agriculture</i>" menjadi "<i>Joint Agriculture Working Group</i>".</p> <p>7. Pertemuan <i>the 2<sup>nd</sup> Joint Agriculture Working Group</i> Indonesia – Timor-Leste akan dilaksanakan pada tahun 2017 di Dili.</p>	
14.	26 Agustus 2015 di Bogor	Menghadiri undangan bilateral technical meeting Sidang Komisi Bersama (SKB) RI - Mongolia	Kemenpolhukan, Kemenko Perekonomian, Kemenhan, Kemendag, Kementerian ESDM, Kementerian Dikbud,	1. Sidang Komisis Bersama (SKB) Indonesia – Mongolia tingkat Wakil Menteri Luar Negeri akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14 September 2015. Namun demikian sesuai hasil diskusi dengan pihak Kedutaan Besar Mongolia diinformasikan bahwa SKB akan dilaksanakan di Mongolia pada bulan November atau Desember	Pusat KLN akan menyampaikan surat resmi kepada pihak Mongolia mengenai usulan waktu pelaksanaan pertemuan, mengingat tanggal 24 September 2015 merupakan

			Kementan, Kementerian Pariwisata, Kemenhub, Kementerian PPPA, BKPM, Kemenlu dan PINDAD	<p>2015. Hal ini terkait dengan kondisi dalam negeri Mongolia yang belum kondusif akibat mundurnya beberapa Menteri dalam kabinet.</p> <p>2. Hal-hal yang dibahas saat pertemuan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembukaan kantor perwakilan Indonesia di Mongolia</li> <li>• Kerja sama pertahanan dan keamanan</li> <li>• Kerja sama perdagangan</li> <li>• Kerja sama Investasi</li> <li>• Kerja sama pertambangan</li> <li>• Kerja sama Pariwisata dan Kebudayaan</li> <li>• Kerja sama Pendidikan</li> <li>• Kerja sama Pertanian, dan</li> <li>• Kerja sama Perhubungan</li> </ul> <p>3. Khusus untuk kerja sama bidang pertanian, disampaikan bahwa Pihak Indonesia telah menyampaikan usulan untuk melaksanakan Joint Agriculture Working Group (JAWG) RI – Mongolia ke-1 pada tanggal 16-17 September 2015. Namun demikian mengusulkan untuk melaksanakan pertemuan pada tanggal 23-30 September 2015, mengingat pada tanggal yang sama Mongolia akan menjadi tuan rumah Asian Pacific Regional Meeting of the World Veterinary Organization ke-29.</p>	hari libur nasional (Idul Adha).
15.	26 Agustus 2015 Istana Presiden	Penandatanganan MoU Bidang Pertanian RI – Timor Leste	Menteri Pertanian RI, Menteri Pertanian & Perikanan Timor- Leste, Pusat KLN, Kemlu	<p>1. Telah ditandatangani MoU kerja sama bidang pertanian RI – Timor-Leste yang dilakukan dihadapan Bapak Presiden Jokowi.</p> <p>2. Area kerja sama meliputi bidang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peternakan</li> <li>• Perkarantinaan</li> <li>• Tanaman pangan</li> <li>• Tanaman industri</li> </ul>	Akan dibahas bentuk kerja sama bidang pertanian yang konkret sebagai tindak lanjut penandatanganan MoU.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesehatan hewan</li> <li>• Spesies terancam punah</li> <li>• Hortikultura</li> <li>• Standar kualitas dan keamanan produk pertanian dan peternakan, dan</li> <li>• Area kerja sama lain yang disepakati oleh kedua pihak.</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--

#### KERJASAMA REGIONAL

1.	26-30 Juli 2015 Coron, Palawan Filipina	Pertemuan BIMP-EAGA <i>Agro-Industry Working Group</i>	Pusat KLN, Perwakilan Malaysia, Perwakilan Filipina, BEBC Filipina, BEBC Malaysia, BIMP-FC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertemuan bertujuan untuk membahas pending matters, progress, dan rencana kerja ke depan WG Agro-industry dan akan disampaikan pada Pertemuan BIMP-EAGA Agribusiness Cluster ke-3 pada bulan Oktober 2015 di Langkawi, Malaysia.</li> <li>2. BEBC menyampaikan bahwa dalam rangka memajukan kerjasama swasta dalam BIMP-EAGA, hal yang terpenting adalah harmonisasi peraturan yang berada dibawah CIQS. Selain itu, isu penting lainnya adalah isu transportasi yang harus segera diselesaikan dan dicarikan solusinya, seperti pada proyek Davao-Gensan-Bitung Shipping Services. BEBC bersedia untuk membantu mencari pihak swasta potensial. Kemudian, BEBC mendorong agar protokol prosedur karantina di perbatasan lebih diperketat.</li> <li>3. Disampaikan juga arahan Senior Official pada saat SO Retreat yaitu: (i) perlunya informasi lebih lanjut tentang seluruh proyek termasuk deskripsi, kemajuan dan yang terpenting adalah dampak dari proyek kepada masyarakat; (ii) mempercepat pelaksanaan proyek-proyek prioritas yang teridentifikasi untuk memastikan</li> </ol>	Pusat KLN akan mendistribusikan laporan kepada Instansi terkait.
----	---	--	--	---	--

				<p>pelaksanaan seluruh proyek dan rencana aksi yang telah disepakati selama SPM tepat waktu;</p> <p>(iii) Mendorong pertemuan konvergensi yang terkait erat dengan isu-isu lintas sektoral sesegera mungkin.</p> <p>4. Filipina mempresentasikan hasil-hasil pertemuan <i>The 2nd BIMP-EAGA Agribusiness Cluster Meeting</i> yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 di Filipina. Hal-hal yang terkait WG Agro-industry antara lain:</p> <p><i>i. JV on Hybrid Rice Seeds Production.</i> Kerjasama antara PT SHS (Indonesia) dan SLAC (Filipina). Target penanaman padi hibrida di Indonesia tidak mengalami perubahan sejak SPM 2014.</p> <p><i>ii. Hybrid Corn Production Project.</i> Hal-hal yang menjadi sorotan dalam <i>Hybrid Corn Production Project</i>, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PT. AHSTI (Asian Hybrid Seed Technology Indonesia) menargetkan pengembangan jagung hibrida tidak hanya difokuskan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, tetapi juga di wilayah Indonesia-EAGA lainnya serta BIMP-EAGA, tergantung pada mitra strategis yang teridentifikasi</li> <li>• PT AHSTI juga mencari bantuan khususnya dalam pembiayaan proyek.</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--

				<p>iii. <i>2nd BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Fair and Business Leaders Conference</i>. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 23-26 Oktober 2014 di SMX, SM Lanang, Davao City, Filipina. Indonesia berpartisipasi 44 booth dalam pameran ini, terdiri dari 3 propinsi Indonesia-GT (Bengkulu, Sumatera Selatan, Aceh), 2 propinsi Indonesia-EAGA (Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan), UKM binaan Kemendag, UKM binaan Ditjen PPHP Kementan, BKPM, UKM dari Garut, dan lainnya.</p> <p>iv. <i>Strengthening of the Smallholder Coconut-based Industries Project (SSCIP)</i>. Indonesia mencari klarifikasi dari Filipina mengenai implementasi proyek yang hanya melibatkan Filipina, sedangkan proyek ini awalnya merupakan usulan Filipina dan Indonesia. Pihak Filipina menjelaskan bahwa terkait keterbatasan jumlah dana yang disetujui oleh pihak donor (JAIF) dan keterbatasan waktu yang dimiliki untuk mendapatkan persetujuan proyek tersebut, JAIF hanya dapat mendanai kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh Filipina. Pihak Filipina menyampaikan pelibatan Indonesia dalam proyek ini (pada program <i>capacity building</i>) bergantung kepada perkembangan proyek itu sendiri dan keputusan dari JAIF. Filipina juga menyampaikan bahwa ada kesempatan untuk mencari pendanaan dari ASEAN seperti ASEAN-ROK, ASEAN-China. Perlu diingat bahwa proposal perlu melibatkan sedikitnya dua negara anggota ASEAN</p>	
--	--	--	--	--	--



2.	28 Juli 2015 Kementerian Pertanian	Persiapan APO “ <i>Workshop on Agrotourism Business Development</i> ”	Kementan, Kemenaker & Trans	Hal-hal yang dibahas pada pertemuan tersebut antara lain: 1. Kegiatan <i>Workshop</i> yang sedianya akan diselenggarakan di Kawasan Agrowisata “Kusuma Agrowisata”, Jl. Abdul Gani Atas PO. Box 34, Kota Wisata Batu, Jawa Timur, dipindah lokasi ke Hotel clarity, jl. Cihampelas No. 211-217, Cihampelas, Bandung, Jawa Barat, Hal ini dikarenakan aktivitas Gunung Raung di Bondowoso Jawa Timur sehingga menyebabkan ketidakpastian jadwal penerbangan untuk peserta <i>Workshop</i> baik yang berasal dari Luar Negeri maupun peserta dalam negeri ; 2. Acara pembukaan dan <i>welcome dinner</i> akan diselenggarakan pada tanggal 3 Agustus 2015; 3. Pusat KLN, ditunjuk secara langsung Sdr. Reynold P. Sitompul diharapkan dapat membantu di bidang keimigrasian (penjemputan) tanggal 1-2 Agustus 2015, serta dapat mendampingi narasumber dan tamu APO tanggal 3-7 Agustus 2015.	1. Setditjen PPHP mengharapkan kesediaan Bapak Kepala Pusat KLN untuk menghadiri <i>technical meeting</i> (sebelum pelaksanaan <i>Workshop</i> ) pada tanggal 2 Agustus 2015 (sore hari), dan pada acara pembukaan serta <i>welcoming dinner</i> (3 Agustus 2015). 2. Menunggu surat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM serta Sekretariat Negara.
3.	2-4 Agustus 2015, Hotel Clarity, Bandung, Jawa Barat	Koordinasi APO “ <i>Workshop on Agrotourism Business Development</i> ”	Kementan, Kemenaker & Trans, Dinas Pertanian Prov. Jawa Barat, Perguruan Tinggi, dan para pelaku Agrowisata terkait	1. <i>Workshop</i> dihadiri oleh 17 (tujuh belas) peserta dari 15 (lima belas) Negara anggota APO diantaranya Cambodia, Republic of China, Fiji, India, IR Iran, Republic of Korea, Lao PDR, Malaysia, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Viet Nam, dan Indonesia yaitu dari. Dalam pertemuan tersebut, juga menghadirkan dua narasumber dari Belanda dan USA, serta beberapa <i>observer</i> ,	Kementerian Pertanian RI & Sekretariat APO di Tokyo mengharapkan para peserta dapat mengimplementasikan hasil yang diperoleh selama kegiatan berlangsung, terutama implementasi kepada petani dan pelaku usaha kecil dan mengembangkan agro wisata di daerahnya masing-masing

				<p>2. Kegiatan <i>workshop</i> dibuka pada tanggal 3 Agustus 2015 oleh Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan ucapan selamat datang kepada para peserta, selain itu beliau juga mengenalkan bahwa Bandung sebagai tempat yang bernuansa pegunungan, persawahan, perkebunan, dan pertanian memiliki banyak tempat agrowisata. Bandung memiliki sarana terbuka untuk pembelajaran “<i>Urban Farming/Urban Agriculture</i>”;</p> <p>3. Tujuan pembinaan agro wisata adalah untuk lebih memahami pentingnya pembinaan agro wisata sebagai salah satu alternatif dan cara membina masyarakat dalam mewujudkan sinergitas pariwisata dengan pertanian yang dapat menghasilkan pertumbuhan sosial, ekonomi dan organisasi masyarakat.</p>	
4.	3-4 Agustus 2015 Bandung	Koordinasi APO TES on Performance Management Level	APO BPPSDMP	<p>Kegiatan ini merupakan Kerjasama Kementerian Pertanian RI c.q pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, dengan <i>Asian Productivity Organization (APO)</i> di Jepang;</p> <p>Kegiatan ini akan dipandu oleh 1 (satu) orang narasumber dari APO, dan akan dihadiri sekitar 30 (tiga puluh) orang peserta dari dalam negeri;</p> <p>Pelatihan ini bertujuan untuk:</p> <p>a) meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta diklat dalam mendefinisikan dan mengukur kinerja instansi;</p> <p>b) pengenalan konsep dan metode untuk mengkaji kinerja instansi dan manfaatnya terhadap organisasi;</p>	Dengan adanya pelatihan tersebut, diharapkan para peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dan konsep pelatihan yang diperoleh sehingga meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan inovasi konsep pelatihan dan meningkatkan kemampuan SDM.

				<p><i>Performance management</i> adalah usaha untuk mendapat hasil yang lebih baik, baik bagi organisasi, tim maupun individual dengan memahami dan memanaj <i>performance</i> dalam kerangka tujuan, standar dan kompetensi yang terencana dan telah disepakati bersama; Tujuan utama <i>performance management</i> adalah menciptakan budaya dimana individu dan kelompok dapat bertanggungjawab terhadap perbaikan proses bisnis, skill &amp; kontribusi mereka sendiri.</p> <p>Manfaat pelatihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta memahami bagaimana langkah strategis dalam mencapai pelayanan yang lebih “cepat, aksesibel, mudah, dan sesuai kebutuhan kelompok sasaran, dengan focus pada perbaikan aspek sumber daya manusia;</li> <li>• Mampu menyusun program pengembangan kompetensi sumberdaya manusia untuk meningkatkan kemampuannya dalam manajemen dan pelaksanaan pelayaan internal organisasi</li> <li>• Mendukung program peningkatan prosedur dan organisasi pelayanan sebagai bagian dari prosedur, personil, <i>policy</i> dan organisasi dalam peningkatan kinerja manajemen pelayanan.</li> </ul>	
5.	6 Agustus 2015 Kemenko Perekonomian	Rapat Persiapan IMT-GT Post Summit SOM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemenko Perekonomian</li> <li>• JBC</li> <li>• Kemhub</li> <li>• Kemdag</li> <li>• Kempar</li> <li>• Kemenaker</li> <li>• Prop. Kepulauan Riau</li> </ul>	1. Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub-Regional, dihadiri oleh perwakilan dari Kemenlu, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Tenaga Kerja, BAPPEDA Sumatera Utara, JBC Indonesia, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kepulauan Riau, dan Kementerian Pertanian (Dit. Mutu dan Standardisasi PPHP, dan Pusat KLN).	Kemenko Perekonomian selaku Ketua Seknas KESR menginformasikan bahwa dalam rangka pembahasan Post-2016 Agenda, akan dilakukan kegiatan Konsultasi Nasional, sebagai berikut:

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prop. Sumatera Utara</li> </ul>	<p>2. Pertemuan dimaksud akan berlangsung pada tanggal 12 s.d 13 Agustus 2015 di Hotel Grand Mercure, Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Dengan susunan acara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 Agustus 2015, Post Summit Meeting (SOM)</li> <li>• 13 Agustus 2015, Advisory Committee Meeting</li> </ul> <p>3. Tujuan pertemuan IMT-GT <i>Post-Summit Senior Officials Meeting</i> adalah membahas dan menyusun Rencana Aksi dari Arahan Kepala Negara dalam KTT IMT-GT ke 9, membahas isu-isu utama terkait <i>Working Group</i>, dan mempersiapkan rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-21 yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 13 November 2015 di Langkawi, Malaysia.</p> <p>4. Adapun agenda pertemuan IMT-GT <i>Post-Summit Senior Officials Meeting</i> adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tindak lanjut arahan Kepala Negara dalam KTT IMT-GT ke-9</li> <li>b. Implementasi <i>Mid Term Review</i> (MTR) dan Status Bantuan ADB (<i>Green Cities</i>)</li> <li>c. Laporan Perkembangan <i>Joint Sunisess Council</i></li> <li>d. Persiapan Rangkaian Pertemuan tingkat Menteri ke-21</li> </ul> <p>5. Malaysia selaku Ketua <i>Working Group on Agriculture, Agro-Based Industry and Environment</i> saat ini, akan melakukan presentasi terkait perkembangan proyek-proyek yang ada di dalam IB, pada pertemuan tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 14 – 15 September 2015, diMakassar, Pembahasan Post-2016 Agenda BIMP-EAGA</li> <li>b. 29-30 September 2015, di Batam, Rakor Nasional IMT-GT: Pembahasan Implementation Blueprint Pasca 2016.</li> <li>c. Pusat KLN akan bersurat kepada Sesditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dit. Pemasaran Internasional PPHP, Kepala PUSKITA Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat, Kepala BKPM Propinsi Bengkulu terkait usulan delri untuk ikut hadir pada pertemuan dimaksud, serta masukan informasi-informasi terkait perkembangan proyek dan usulan-usulan proyek.</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

				<p>6. Point-point penting yang perlu dimasukkan dalam Laporan Working Group antara lain:</p> <p>a. Tanggapan dan tindak lanjut arahan Leadres' bagi masing-masing Working Group</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Review</i> Sektor Strategis</li> <li>• Formulasi rumusan dan implementasi proyek supaya lebih efisien</li> <li>• Keterlibatan pemerintah daerah dan sektor swasta</li> </ul> <p>b. Tanggapan dan saran terhadap IB <i>Mid Term Review</i> terkait dengan masing-masing <i>Working Group</i></p> <p>7. Kami menyampaikan terkait dengan perkembangan WGAAE, Indonesia akan menyampaikan usulan proposal baru, yaitu: Magang Petani ke Thailand (diusulkan oleh Propinsi Bengkulu), dan Farmers Market Development (yang diusulkan oleh Dit. PI, PPHP). Kedua proposal dimaksud akan disampaikan lebih detail pada pertemuan WGAAE ke-8, bulan Oktober 2015 di Malaysia.</p> <p>8. Pimpinan rapat mengingatkan 3 (tiga) hal penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan kerjasama IMT-GT ini, yaitu:</p> <p>a. Perlunya peningkatan keikutsertaan dan keterlibatan pemerintah daerah dengan Working Group</p> <p>b. Revitalisasi kerjasama IMT-GT agar lebih terintegrasi dan sinergi antar setiap unsurnya, termasuk CMGF</p> <p>c. Perlu dukungan dari semua lini untuk proposal kegiatan atau proyek yang diajukan.</p>	
--	--	--	--	---	--

				9. Terkait dengan isu perkarantinaan, JBC Indonesia menyampaikan concern-nya dan mengharapkan agar hal-hal yang dicapai dalam CIQS dapat mendukung kerjasama IMT-GT khususnya dalam memperlancar arus perdagangan lintas batas.	
6.	7 Agustus 2015 Gedung BKP Kementan	Rapat Persiapan <i>APEC HLPD-FSBE</i> dan <i>APEC FSCF</i>	KSLN-BPOM, Dit. KIK ASPASAF-Kemlu, Balitbang Pertanian, Dit. PLN-PPHP, Pusat KLN, KADIN dan jajaran unit teknis BKP.	<p>1. Pertemuan HLPD-FSBE akan diselenggarakan pada tanggal 4-6 Oktober 2015 di Iloilo, Filipina. Pertemuan akan membahas dan menyepakati <i>APEC Food Security Action Plan</i> yang akan menjadi strategi jangka panjang OFWG dalam rangka mencapai ketahanan pangan di Asia Pasifik yang sejalan dengan <i>APEC Food System</i> dan <i>PPFS Roadmap on Food Security</i>. Keluaran dari Pertemuan dimaksud akan dibawa ke KTT APEC 2015.</p> <p>2. Tiga isu penting yang akan diangkat di HLPD-FSBE antara lain: <i>Illegal, unregulated and unreported (IUU) fishing; Improve biodiversity of all support-ecosystems; Create well-maintained ecosystems that provide more ecological goods and better ecological goods and better ecological services.</i></p> <p>3. Terkait dengan isu dimaksud, Kementerian Pertanian cq. BKP selaku <i>focal point</i> dari PPFS akan bersurat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Balitbang Pertanian-Kemtan untuk meminta masukan posisi Indonesia.</p> <p>4. Pertemuan HLPD-FSBE ini direncanakan sebagai pertemuan setingkat menteri atau pejabat eselon I.</p>	<p>1. BKP akan mengundang rapat lanjutan untuk menentukan susunan delegasi dan membahas posisi DELRI menindaklanjuti surat Sekjen kepada seluruh <i>Focal Point</i> APEC Kemtan.</p> <p>2. BKP akan menyelenggarakan Workshop dlm waktu dekat untuk membahas posisi <i>Working Group</i> APEC PPFS sebelum rangkaian pertemuan bidang Ketahanan Pangan di Iloilo. Terkait dengan rencana workshop ini BKP berharap dapat bekerjasama dengan PKLN dalam hal <i>sharing</i> biaya untuk mengundang sekitar 50 orang peserta dari Pemerintah, Swasta &amp; perwakilan petani seperti yang pernah dilaksanakan tahun 2013 lalu.</p>

				<p>5. Terkait hal ini, mengingat isu yang akan diangkat merupakan isu lintas-sektoral, maka Indonesia akan mengusulkan agar ada 2 Ketua Delegasi dari Kemtan dan KKP kepada panitia Filipina. Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) akan berkomunikasi dengan panitia APEC Filipina agar dapat mengirimkan surat undangan HLPD-FSBE kepada Menteri Pertanian dan Menteri KKP.</p> <p>6. Selain daripada itu, isu-isu yang pernah diangkat pada pertemuan sebelumnya seperti <i>Food Security Operational Business Plan</i> dan <i>Leaders' Declaration and Food Security Action Plan</i> sampai saat ini belum ada indikasi akan dibahas pada pertemuan APEC Filipina 2015. Dapat kami informasikan bahwa <i>Food security operational business plan</i> merupakan isu yang diinisiasi oleh AS pada saat APEC Indonesia tahun 2013 namun tidak diteruskan di APEC China tahun 2014. Sedangkan <i>Leaders declaration and Food security action plan</i> yang merupakan hasil dari APEC Indonesia tahun 2013, dibahas sepintas di APEC China tahun 2014 juga belum ada indikasi akan diangkat pada pertemuan PPFs di Ilo Ilo ini.</p> <p>7. Disamping HLPD-FSBE, Indonesia juga memperoleh undangan untuk mengikuti <i>Food Safety Cooperation Forum (FSCF)</i> meliputi serangkaian pertemuan: i. <i>FSCF 2<sup>nd</sup> Expert Workshop on Harmonisation of Pesticide Maximum Residue Limits (MRLs) for Imported Foods in APEC Member Economies</i> (23-24 Agustus 2015); ii. <i>FSCF PTIN Workshop on Effective Industry-Regular Cooperation</i> (24-25</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Agustus 2015); iii. <i>FSCF PTIN Steering Group</i> (25 Agustus 2015); iv. <i>5<sup>th</sup> Meeting of the APEC Food Safety Cooperation Forum</i> (26 Agustus 2015). Forum FSCF dimaksud bertujuan membangun sistem keamanan pangan yang kuat diantara negara anggota APEC dan mendorong kerjasama terkait peraturan antara pemerintah dan swasta, membangun kapasitas stakeholder terkait serta meningkatkan komunikasi dan pertukaran informasi.</p> <p>8. Forum FSCF tersebut melibatkan K/L terkait diantaranya Badan POM, BSN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kemlu. Dikarenakan isu yang dibahas mengenai pangan dan isu MRLs maka Kementerian Pertanian juga diharapkan akan memberi masukan di forum tersebut.</p> <p>9. Kemlu sebagai koordinator APEC Indonesia akan mengundang rapat persiapan dan koordinasi antara K/L terkait APEC SOM 3 dan APEC HLPD-FSBE dan APEC FSCF, yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2015 di Bogor.</p>	
7.	9-15 Agustus 2015 Gambia	Training needs Assessment untuk Pelatihan di gambia 2016	Tim terdiri dari perwakilan dari Kemsetneg, Kemlu dan Kemtan	<p>1. Gambia sangat berharap Indonesia dapat memberikan bantuan teknis khususnya di bidang pertanian.</p> <p>2. ARFTC sebagai bentuk nyata upaya dari Pemri melalui YAMPI untuk menjadikan Pusat pelatihan tersebut sebagai hub pertanian di Gambia dan wilayah Afrika Barat, maka komitmen Indonesia untuk merevitalisasi Pusat Pelatihan tersebut sebagai komitmen bersama diantara pemangku kepentingan terkait di</p>	Kemtan dan Kemlu akan berkoordinasi lebih lanjut untuk mempersiapkan rencana pengiriman Tenaga ahli dan pelaksanaan pelatihan di Gambia tahun depan.



				<p>Indonesia dalam kerangka memperkuat kerja sama selatan-selatan Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Pemberian Hibah (Grant) yang saat ini sedang disusun oleh Kementerian Keuangan perlu didorong agar dapat segera diselesaikan agar dapat dijadikan acuan/dasar bagi bantuan Indonesia kepada Pemerintah negara asing khususnya bantuan yang bersifat sarana infrastruktur dan bangunan fisik.</li> <li>4. Rencana pengiriman tenaga ahli Indonesia ke Gambia untuk melatih penyuluh pertanian dan petani Gambia di ARFTC pada awal tahun 2016 perlu dipertimbangkan kelayakan fisik terutama terkait logistik, antara lain penginapan fasilitator/tenaga ahli Indonesia dan peserta mengingat fasilitas akomodasi (dormitory) di ARFTC yang dinilai kurang layak.</li> <li>5. Alternatif lokasi : pelatihan dan praktek tetap dilaksanakan di ARFTC, sedangkan akomodasi alternatifnya di luar ARFTC dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana transportasi lokal bagi pelatih dan peserta.</li> <li>6. Mempertimbangkan kebutuhan program kapasitas bagi Gambia cukup banyak, tidak hanya kebutuhan pelatihan dan pengiriman tenaga ahli Indonesia, tetapi juga kebutuhan untuk revitalisasi ARFTC dan peningkatan pengetahuan dalam jangka panjang (program pendidikan jangka panjang). Oleh karena itu, disarankan agar formulasi program seyogyanya bersifat komprehensif dan bersifat integrated program dan jangka waktu cukup panjang (3</li> </ol>	
--	--	--	--	---	--

				<p>s.d. 5 tahun) yang mencakup tingkatan kebutuhan program bagi Gambia sehingga dampak dan manfaatnya lebih berkesinambungan (sustainable impact) termasuk bagi kepentingan Indonesia.</p> <p>7. Mendorong program beasiswa yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia antara lain Program Darmasiswa (non-degree), program beasiswa unggulan yang dikoordinasikan oleh Kemendikbud dan program beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (Program KNB) yang dikoordinasikan oleh Kemenristek Dikti khususnya di bidang pengetahuan budaya dan bahasa Indonesia serta pertanian dapat ditawarkan kepada Gambia.</p>	
8.	12- 13 Agustus 2015	Pertemuan IMT-GT Post Summit Senior Officials' Meeting	Delegasi Perwakilan Indonesia , Malaysia, Thailand, ADB, CIMT dan JBC Indonesia, Malaysia dan Thailand	<p>1. CIMT menyampaikan rangkuman hasil pertemuan 9<sup>th</sup> IMT-GT <i>Leaders' Summit Directives</i> yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2015 di Langkawi, Malaysia. Para pemimpin dari negara anggota IMT-GT menyambut baik hasil perkembangan implementasi Bluprint 2012-2016, disamping itu mereka juga menyampaikan perlunya peran serta lebih baik dari pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak swasta terkait dalam rangka mensukseskan program-program terdapat dalam forum kerjasama IMT-GT.</p> <p>2. Terkait dengan <i>Working Group on Agriculture, Agro-Based Industry and Environment</i>, ada beberapa arahan dari para Kepala Negara IMT antara lain perlunya memperkuat komitmen kerjasama antar instansi terkait dalam memanfaatkan forum kerjasama IMT-GT.</p>	<p>1. Pertemuan 22<sup>nd</sup> Senior Officials' Meeting and 21<sup>st</sup> Ministerial Meeting akan dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 13 November 2016 di Alor Setar, Kedah, Malaysia.</p> <p>2. Seluruh instansi terkait baik pemerintah di pusat maupun di daerah khususnya yang bergerak dibidang pertanian diharapkan berpartisipasi aktif dan memanfaatkan peluang Kerjasama IMT-GT untuk mewujudkan ketahanan pangan dikawasan, meningkatkan ekspor komoditas pertanian, dan</p>

				<p>Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan oleh <i>working group</i>, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi komoditi pertanian unggulan dari masing-masing daerah untuk kerjasama pembangunan teknologi dan pertukaran ilmu pertanian.</li> <li>• Berkerja sama dalam meningkatkan promosi dan perdagangan dibidang pertanian di area IMT-GT</li> <li>• CIMT diharapkan dapat mengadakan pelatihan "<i>rubber value chain</i>" di area IMT-GT.</li> </ul> <p>3. ADB menyampaikan beberapa point penting terkait dengan <i>Working Group on Agriculture, Agro-Based Industry and Environment</i>, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya strategi yang berorientasi pada riset dan teknologi, promosi investasi, pertanian ramah lingkungan, mengurangi sektor perdagangan</li> <li>• Lemahnya proyek portofolio yang terbatas pada beberapa produk, dengan tidak memanfaatkan keragaman produk di wilayah tersebut</li> <li>• Perlunya mengembangkan / memperluas kerjasama dalam berbagai produk lainnya seperti produk perikanan dan produk tanaman pangan lainnya. Selain itu, dibutuhkan juga fasilitasi promosi khususnya untuk mengidentifikasi hambatan administratif dalam perdagangan dan investasi di bidang pertanian pada daerah-daerah perbatasan.</li> </ul>	<p>meningkatkan kesejahteraan bagi petani dan nelayan.</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>4. Malaysia selaku Ketua <i>Working Group on Agriculture, Agro-Based Industry and Environment</i>, mempresentasikan perkembangan proyek-proyek yang terdapat didalam <i>Working Group</i> lebih lanjut, serta menyampaikan 2 usulan proyek baru dari Indonesia, diantaranya:</p> <p>I) <i>Farmers Internship in Thailand</i>, yang diusulkan oleh BKPMD Bengkulu. (diperlukan diskusi lebih lanjut di WGAAE <i>meeting</i> dan persetujuan dari MOAC Thailand)</p> <p>II) <i>Farmers Market Development</i>, yang diusulkan oleh Direktorat Pemasaran Internasional, Direktorat Jenderal PPHP, Kementerian Pertanian. (<i>Project Template</i> akan disampaikan oleh Indonesia dalam pertemuan WGAAE mendatang untuk kemudian didiskusikan lebih lanjut)</p> <p>5. Selain itu, Ketua WGAAE menyampaikan rencana penyelenggaraan <i>3<sup>rd</sup> BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Fair and Business Leaders' Conference</i>, yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 di Makassar, Sulawesi Selatan.</p>	
9.	13 Agustus 2015 IPB-ICC Bogor	Pertemuan <i>National Stakeholders Consultation and Preparatory Meeting for APEC SOM 3 and Related Meetings 2015</i>	Kemdag, Kemkeu, Kemkes, Kemperin, KKP, Kem.ESDM, Kem.KUKM, Kemsos, Bappenas, BNPT, BPOM, BSN, KPK dan Kemtan (BKP, Balitbang Pertanian dan PKLN)	1. Pertemuan APEC SOM 3 akan diselenggarakan pada tanggal 5-6 September 2015 di Cebu Filipina yang akan didahului dengan rangkaian pertemuan fora/ WG APEC SOM3 pada tanggal 24 Agustus-6 September 2015. Selain itu, juga akan dilaksanakan pertemuan tingkat menteri dan tingkat pejabat senior yaitu <i>High Level Policy Dialogue on Food Security and Blue Economy (HLPD-FSBE)</i> pada tanggal 4-6 Oktober 2015 di Iloilo, Filipina.	Kemtan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan para stakeholder PPFS (KKP, Kemlu, BPOM, swasta) guna mempersiapkan posisi delri pada pertemuan HLPD-FSBE. Selain itu, Dalam rangka membahas posisi delri pada <i>Working Group APEC PPFS</i> , BKP dan

				<p>2. Terkait hal ini, perwakilan dari Kemtan yaitu Bpk. Tjuk Eko Hari Basuki, Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan-BKP menyampaikan beberapa perkembangan sebagai berikut:</p> <p>3. Pada tanggal 7 Agustus 2015, Kemtan telah mengundang K/L terkait (KKP, Kemlu, BPOM, KADIN) dalam rapat persiapan rangkaian APEC SOM 3 bidang pertanian dan HLPD-FSBE.</p> <p>4. Terkait dengan HLPD-FSBE terdapat 3 isu prioritas yang akan dibahas yaitu: i. <i>Illegal, unregulated and unreported (IUU) fishing</i>, ii. <i>Improve biodiversity of all support-ecosystems</i>, iii. <i>Create well-maintained ecosystems that provide more ecological goods and better ecological goods and better ecological services</i>. Terkait dengan isu tersebut Kemtan telah meminta masukan posisi Indonesia kepada KKP dan Balitbang Pertanian-Kemtan (BB Biogen) dengan batas waktu 2 minggu sejak rapat dilaksanakan.</p> <p>5. Selanjutnya disampaikan bahwa fora PPFS menyarankan agar pertemuan tingkat menteri sebaiknya tetap 2 tahun sekali sehingga untuk pertemuan HLPD-FSBE ini kiranya dapat dihadiri oleh pejabat eselon I dan diusulkan pula agar ada 2 Ketua Delri yang berasal dari Kemtan dan KKP yang akan hadir pada pertemuan HLPD-FSBE karena mengingat isu yang akan dibahas merupakan isu lintas sektoral. Terkait dengan susunan delri dari Kemtan dan KKP dampai saat ini belum ditetapkan secara definitif dan akan dibahas lebih lanjut setelah tersusunnya posisi delri dari</p>	<p>Pusat KLN bekerjasama untuk menyelenggarakan Workshop dalam waktu dekat</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>hasil masukan-masukan yang berasal dari K/L terkait HLPD-FSBE.</p> <p>6. Selain itu, disampaikan pula bahwa untuk isu-isu yang pernah diangkat pada pertemuan PPFS sebelumnya yaitu <i>Food Security Operational Business Plan</i> dan <i>Leaders' Declaration and Food Security Action Plan</i> sampai saat ini belum ada indikasi akan dibahas pada pertemuan APEC Filipina 2015. Terkait dengan <i>Food Security Operational Business Plan</i> yang diinisiasi oleh AS pada saat APEC Indonesia tahun 2013 tidak diteruskan di APEC China tahun 2014. Sedangkan <i>Leaders Declaration and Food Security Action Plan</i> yang merupakan hasil dari APEC Indonesia tahun 2013, dibahas sepintas di APEC China tahun 2014 juga belum ada indikasi akan diangkat pada pertemuan PPFS di Iloilo ini.</p> <p>7. Kemlu menginformasikan bahwa akan ada rapat lanjutan yang akan membahas perkembangan dari fora/ sub fora APEC di K/L terkait dalam rangka menyongsong <i>APEC Economic Leaders' Meeting (AELM)/ KTT 2015</i> yang akan dilaksanakan pada tanggal 13-19 November 2015 di Manila, Filipina dan membahas kegiatan persiapan APEC Peru 2016 yang akan terdiri dari mendata jadwal pertemuan APEC Peru 2016, persiapan anggaran K/L untuk APEC Peru 2016, proyek (<i>concept notes</i>) dan inisiatif Indonesia yang direncanakan akan diusulkan pada APEC Peru 2016.</p>	
--	--	--	--	---	--

10.	20 Agustus 2015 Kementerian Perdagangan	Konsultasi Publik Perjanjian Perdagangan Indonesia dengan Negara berkembang melalui <i>PTA D-8, TS- OIC, dan GSTP</i>	Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, BKPM, BAPPENAS, dan beberapa pelaku usaha	Hal-hal yang dibahas pada pertemuan tersebut antara lain:  1. Pentingnya <i>South-South Trade</i> , diantaranya: a. <i>Booming</i> pertumbuhan pertumbuhan perdagangan (perdagangan Selatan-Selatan meningkat berlipat ganda dalam waktu 20 tahun terakhir, mencapai 44,81% di tahun 2013; b. Indonesia lebih unggul dengan Negara- negara anggota D-8, OKI, dan GTSP.  2. Perlunya sinergitas yang lebih baik lagi antara sektor swasta/pelaku usaha, melalui KADIN, dengan pemerintah dan stake holder lainnya dalam rangka menciptakan lingkungan berusaha yang baik dan nyaman bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitasnya.	Dengan adanya pertemuan tersebut, diharapkan pihak pemerintah dan para pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang perdagangan internasional bagi peningkatan perdagangan dan industri (di berbagai sektor/komoditas).
11.	20 Agustus 2015 Kalimantan Barat	Diseminasi Program BLN - IFAD: Paradigma Dan Aspek Tematik Untuk Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pusat KLN Kementan. SKPD lingkup propinsi dan kabupaten Kalimantan Barat	1. Terdapat tujuh studi atau kajian IFAD yang telah dilaksanakan sejak 2010-2014, yaitu: (a) Kebijakan pembangunan pertanian; (b) Pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan pertanian; (c) Pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur perdesaan; (d) Kinerja lembaga keuangan mikro; (e) Pengembangan inovasi teknologi di lokasi program BLN; (f) Kinerja dan perspektif manajemen rantai pasok produk pertanian di Indonesia; (g) Industri benih di Indonesia.  2. <b>Sesi 1. Paradigma pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan: perspektif global dan implikasinya untuk Indonesia</b> , oleh Prof. Dr. I Wayan Rusastra (Badan Litbang Pertanian)	Program READ ini akan direplikasikan di Kalimantan Barang, perlu koordinasi yang sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa program ini akan berhasil, seperti di Poso Sulawesi Tengah

				<p>a. Komponen dasar pembangunan perdesaan inklusif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinergi pengembangan SDM dan program pembangunan</li> <li>- Pendekatan pembangunan dan pemberdayaan secara holistic</li> <li>- Transformasi struktur ekonomi pertanian dan perdesaan, dengan prinsip dasar: adopsi teknologi terbaru, investasi pendidikan, penurunan biaya transaksi, dan efisiensi alokasi sumber daya. Transformasi struktur ekonomi pertanian perlu memperhatikan dua peta jalan utama (modernisasi pertanian dan formalisasi UMKM) dan dua peta jalan transisi (sektor informal non pertanian di perdesaan dan migrasi/integrasi ekonomi desa-kota)</li> </ul> <p>b. Paradigma pengentasan kemiskinan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan perdesaan inklusif</li> <li>- Transformasi structural ekonomi perdesaan</li> <li>- Pertumbuhan inklusif ekonomi nasional</li> </ul> <p>c. Kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas secara nasional: (i) pengurangan ekonomi dan logistic biaya tinggi, dukungan teknologi, (ii) regulasi dan iklim investasi yang kondusif, (iii) prioritas tinggi pada investasi infrastruktur fisik dan kelembagaan untuk pertumbuhan berkelanjutan</p>	
--	--	--	--	---	--



				<p>d. Kebijakan pengentasan kemiskinan perdesaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan usaha tani skala kecil</li> <li>- Peningkatan daya saing komoditas pertanian</li> <li>- Pembangunan perdesaan berlandaskan agribisnis</li> </ul> <p><b>3. Sesi 2. Tinjauan tematik untuk mendukung sukses dalam replikasi proyek READ, oleh Prof. Firdaus, IPB.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dampak pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan (DAS): PIDRA peningkatan pengusahaan lahan dari 0.95 per rt menjadi 1,125 ha.</li> <li>b. P4K, dampak: peningkatan permukaan air sumur</li> <li>c. PUTKATI dan PNPM-AP</li> </ul> <p>4. Sesi Diskusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Puslattan: menyarankan agar Pusat KLN menginformasikan peluang peningkatan pelatihan SDm bidang pertanian kepada Sesba SDM</li> <li>b. Untuk pemberdayaan masyarakat miskin, pendekatannya harus participatory, holistic dan multi stakeholder.</li> </ul> <p><b>5. Sesi 3. Penanggulangan kemiskinan melalui Rural Empowerment and Agricultural Development Programme (READ Programme), oleh Bapak Diding, BPPSDMP.</b></p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>a. Program REA bertujuan untuk memperbaiki mata pencaharian masyarakat miskin perdesaan secara berkelanjutan di 150 desa sasaran yang berada di Kabupaten Banggai, Buol, Parigi Moutong, Poso, dan toil-Toli di Propinsi Sulawesi Tengah.</p> <p>b. Tujuan umum yang hendak dicapai adalah pertumbuhan ekonomi perdesaan yang berkelanjutan dan perbaikan pengelolaan sumberdaya alam di desa-desa lokasi program READ.</p> <p>c. Beberapa komponen program READ, yaitu: Komponen A. Pemberdayaan Masyarakat, Komponen B. Perbaikan Mata Pencaharian, Komponen C. Infrastruktur perdesaan, Komponen D. Manajemen Program dan Analisis Kebijakan.</p> <p>d. Desain READ: partisipatory → supaya masyarakat dapat merencanakan, melaksanakan, dst.</p> <p>6. <b>Sesi 4. Success Story Program READ</b>, oleh Mustafa A. Tohan, Program Manager READ Kabupaten Palu.</p> <p>a. Peningkatan pendapatan petani padi, kakao, sayuran, dan usaha non farm</p> <p>b. Adanya peningkatan hasil produksi pertanian</p> <p>c. Pola pikir masyarakat berubah kea rah yang lebih baik</p> <p>d. Kapasitas pengurus kelompok meningkat</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>e. Adanya penambahan sumber mata pencaharian baru</p> <p>f. Peningkatan pengetahuan tentang teknologi budidaya pertanian</p> <p>g. Adopsi teknologi budidaya kakao yang berkelanjutan dari PT MARS</p> <p>h. Terjalin mitra kerjasama antara produsen pupuk bersubsidi (Petrokimia) dengan pengurus kelompok</p>	
12.	21 Agustus 2015/ Kementerian Perdagangan	Rapat Persiapan Komite-Komite ANRPC dan ITRC ke-25	Kemenperin, BPPT, Kemenlu, Kemkeu, BPS, Kementan (Ditjen.Perkebunan dan Pusat KLN) serta asosiasi/ dewan diantaranya Dewan Karet Indonesia, GAPKINDO dan Direktorat Bursa Komoditi Derivatif Indonesia	<p>1. Berdasarkan rotasi, Thailand menjadi Chairman ITRC dari tanggal 1 Januari-31 Desember 2015, sementara dalam Pertemuan ITRC ke-25 ini Ketua Delegasi/NTRC dari Indonesia akan menjadi ketua pertemuan.</p> <p>2. Sehubungan dengan isu <i>Development on rubber cooperation between ITRC and China</i>, saat ini Sekretariat ITRC terus melakukan dialog dengan Ministry of Commerce China dan negara anggota ITRC juga berupaya melakukan komunikasi dengan bantuan Kedutaan China di negara masing-masing anggota ITRC dalam membangun kerjasama ini. Terkait hal ini, Rapat setuju untuk isu ini karena dapat meningkatkan kerja sama dengan China guna mendorong ekspor tariff preferensi <i>compound rubber</i> (bea masuk 0%) dan untuk meningkatkan karet alam di dalam negeri. Saat ini pemri juga sedang mengkonsepkan inpres terkait peningkatan pemanfaatan karet alam di dalam negeri.</p>	Kemtan menyiapkan akan posisi dan susunan delri yang akan mengikuti Pertemuan tersebut.

				<p>3. Terkait dengan isu <i>Carbon credit for natural rubber</i> (NR) diharapkan berbagai stakeholder terkait khususnya pelaku industri dapat membantu <i>replanting</i> untuk mendapatkan <i>carbon credit</i>.</p> <p>4. Berkenaan dengan perkembangan partisipasi kerjasama negara non ITRC di kawasan ASEAN di dalam forum ITRC, bahwa berdasarkan hasil Pertemuan ITRC ke-24 di Bandung dinyatakan bahwa ketiga focal point NTRC di Bangkok, Jakarta dan Kuala Lumpur akan membawa isu ini ke Pertemuan AMAF dan ITRC sudah melakukan koordinasi dengan ASEAN Secretariat di Indonesia. Sebagai informasi bahwa pada hasil Pertemuan ITRC dengan negara CLMV pada tanggal 26 Agustus 2015 di Bandung disampaikan sebagai berikut yaitu: i). akan ada kerjasama lebih lanjut dalam rangka bertukar informasi data dan statistik karet alam antara ITRC dengan CLMV; ii). Secretariat ITRC telah menyiapkan proposal kegiatan antara ITRC dengan CLMV yang akan dilaksanakan di masa mendatang, proposal yang dimasukkan akan dipertimbangkan oleh ITRC di Pertemuan mendatang.</p> <p>5. Perkembangan terkait harga karet ITRC berdasarkan hasil Pertemuan CoP ke-11, tanggal 8 Juni 2015 di Yogyakarta adalah ditetapkan harga CoP ketiga anggota negara ITRC sebesar 184.99 US cents/kg.</p>	
--	--	--	--	--	--

				6. Terkait dengan akan dilaksanakannya Pertemuan tersebut, Kemdag telah mengirimkan surat undangan delri kepada eselon 1 K/L terkait. Kiranya K/L terkait dapat segera menyusun delri dan posisi delri untuk Pertemuan ini.	
13.	20-22 Agustus 2015 Malang	Seminar Comparative Study COMCEC on Integrated Farming System & Penutupan Pelatihan Inseminasi buatan untuk negara anggota MSG dalam kerangka KSST di BBPP Batu, Malang	BBPP Batu, perwakilan dari STPP, para akademisi dari berbagai Universitas di Malang, Unit eselon I terkait lingkup Kemtan	<p><b>Seminar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para narasumber dari BBPP Batu dan Ketindan telah memaparkan hasil dari studi banding IFS yang telah dilaksanakan di Jawa Timur; serta hasil dari kunjungan Tim ke Sudan, Mesir dan Gambia.</li> <li>2. Berbagai masukan yang diterima dari para peserta akan menjadi bahan penyempurnaan materi IFS yang akan diberikan pada training IFS bagi negara-negara anggota COMCEC yang akan dimulai pada tanggal 31 Agustus 2015.</li> </ol> <p>Penutupan Pelatihan Inseminasi Buatan:</p> <p>Pelatihan ditutup secara resmi oleh Dr. Rudy Rawendra (Kepala BBPP Batu).</p>	Pelatihan COMCEC akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2015.
14.	20 Agustus 2015 Ruang Rapat PKLN, Kemtan	Rapat Persiapan <i>Reverse Linkage Project</i> bidang Inseminasi Buatan antara <i>Islamic Development Bank</i>	Kepala Bidang Regional, PKLN dan dihadiri oleh perwakilan dari KPI Bappenas, Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen, Ditjen Peternakan, BBIB Singosari, Bidang Bilateral dan Multilateral PKLN.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusat KLN menyampaikan informasi bahwa MoU sedang dalam proses penandatanganan Menteri Pertanian, diperkirakan MoU dapat ditandatangani hari Senin tanggal 24 Agustus 2015.</li> <li>2. BBIB Singosari selaku pelaksana kegiatan <i>Reverse Linkage on Artificial Insemination</i>, menyampaikan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan tersebut, sesuai dengan presentasi sebagaimana terlampir.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusat KLN akan bersurat kepada K/L terkait jika MoU sudah ditandatangani oleh Bapak Menteri Pertanian.</li> <li>2. Pusat KLN akan memantau perkembangan proses penandatanganan MoU RL.</li> </ol>

				3. Sesuai dengan isi MoU terkait pembentukan <i>Steering Committee</i> , pada rapat telah disetujui akan membentuk <i>Steering Committee</i> , khusus terkait dengan kegiatan <i>Reverse Linkage</i> tersebut.	3. BBIB Singosari menyampaikan beberapa surat sebagai berikut: - Surat Undangan untuk <i>High Level Meeting</i> . - Surat - surat terkait pelaksanaan ( <i>General Information, Workplan, surat permintaan peserta dll</i> ) - Surat kepada Kyrgyz terkait pembelian barang, dan meminta agar Kyrgyz agar menerbitkan <i>clearance</i> untuk barang agar dapat masuk ke Kyrgyz.
15	26-27 Agustus 2015 Mandarin Oriental Jakarta	Private Sektor Engagement and Partnership Workshop	USAID, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan	Workshop bertujuan untuk memperkenalkan dan melihat potensi Perusahaan Swasta dalam berkerjasama dengan Pemerintah Indonesia (Kementerian). Workshop mengajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan Perusahaan Swasta. Dipaparkan langkah-langkah yang seharusnya diambil untuk menghadapi Perusahaan Swasta dan profile-profile perusahaan yang berpotensi dalam membantu dalam pengerjaan project dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia.	Kementerian diharapkan dapat mengaplikasikan cara-cara dan memikirkan kemungkinan untuk bekerjasama dengan Perusahaan Swasta dalam rangka membangun KSST.
16	26 Agustus 2015, Ruang Kerja Kapus KLN	Kunjung Kehormatan Direktur UNCAPSA	Pusat KLN dan UNCAPSA	Mr Masakazu menyampaikan apresiasinya terhadap pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Pertanian dalam mendukung pertanian yang berkelanjutan sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan di Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa program kedepan	UNCAPSA diharapkan dapat lebih mengoptimalkan tenaga ahli yang berasal dari Indonesia dalam implementasi kegiatan UNCAPSA.

				<p>UNCAPSA sebagai salah satu badan subsider dari UNESCAP (Komisi PBB untuk Sosial Ekonomi Asia Pasifik) akan memfokuskan pada pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG). Selain itu, beliau juga menyatakan kesiapan CAPSA untuk mendukung Indonesia dalam mempromosikan Kerjasama Selatan – Selatan di kawasan Asia Pasifik</p> <p>Kepala Pusat KLN menyampaikan arahan Sekjen Kementerian Pertanian agar UNCAPSA dapat melaksanakan kegiatan yang lebih konkrit dalam pengentasan kemiskinan di kawasan, khususnya di Indonesia, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan pertanian berkelanjutan.</p>	
17.	26 Agustus 2015, Kemenko Perekonomian	Rapat Persiapan BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Fair ke-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seknas KESR</li> <li>• Kementan</li> <li>• BKPM</li> <li>• Kemendag</li> <li>• Kemenpariwisata</li> <li>• Kemenkop dan UKM</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat dipimpin oleh Asdep Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub-Regional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Peserta rapat terdiri dari perwakilan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, BKPM, BKPMD Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, dan Pusat Kerja Sama KLN Kementerian Pertanian.</li> <li>2. Pada awal rapat, pemimpin menginformasikan bahwa pertemuan dimaksud akan dilaksanakan pada bulan Oktober – November 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan. Tema dari pertemuan ini adalah “<i>Strengthening the ASEAN Maritime Economic Corridor and Food Security</i>”. Adapun tujuan dari pertemuan dimaksud adalah:</li> </ol>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menampilkan potensi perdagangan dan industri di sektor maritim, perikanan, pertanian, manufaktur dan jasa (termasuk pariwisata).</li> <li>• Promosi kerjasama antar negara dalam perdagangan dan investasi.</li> <li>• Promosi dalam rangka integrasi ASEAN 2015</li> <li>• Pertemuan antar bisnis dalam kerjasama sub regional BIMP-EAGA dan IMT-GT.</li> </ul> <p>3. Tempat pelaksanaan rangkaian pertemuan ini, direncanakan di Celebes Convention Center, Makassar, dengan usulan rangkaian acara sebagai berikut:</p> <p>A. Acara Utama:</p> <p>a) <i>BIMP-EAGA and IMT-GT Trade Expo/ Exhibition</i>- Kemenko Perekonomian, Kemendag, Kementan, Kemen KKP, Kemenkop, Pemprov. Sulsel dan seluruh K/L terkait</p> <p>b). <i>BIMP-EAGA and IMT - GT Business Conference</i> – Kemenko Perekonomian, BKPM</p> <p>c). <i>Business Matching and Investment Forum</i> – Kemenko Perekonomian, BKPM</p> <p>B. Acara Pendukung:</p> <p>a). <i>BIMP-EAGA and IMT-GT Street Food Festival</i> – Kemenkop, Pemprov. Sulsel</p> <p>b). <i>Health Care Tourism Dialogue</i> – Kemenpar</p>	
--	--	--	--	--	--



				<p>c). <i>Culture and Art Performance</i> – Badan Ekonomi Kreatif, Pemprov. Sulsel</p> <p>d). <i>Fashion Show</i> – Badan Ekonomi Kreatif</p> <p>e). <i>Site Visit</i> – Pemprov. Sulsel</p> <p>4. Dalam kesempatan itu, pimpinan rapat menyampaikan bahwa untuk acara <i>Business Conference</i>, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa mereka telah menyiapkan anggaran untuk pertemuan dimaksud. Sedangkan untuk segmen lainnya, pimpinan memohon dukungan Kementerian dan Lembaga terkait lainnya untuk menganggarkan dana dukungan.</p> <p>5. Perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Pusat KLN Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa masing-masing instansi telah menganggarkan dana dukungan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud. Selain itu, disampaikan juga bahwa Kementerian Pertanian sudah menginformasikan rencana pelaksanaan kegiatan ini kepada seluruh Kepala Dinas Pertanian di seluruh wilayah IMT-GT dan BIMP-EAGA melalui surat resmi dari Kepala Pusat KLN.</p> <p>6. Kementerian Pertanian diharapkan mempersiapkan dan mengkoordinir dinas terkait sektor pertanian dan pelaku usaha untuk ditampilkan dalam kegiatan trade fair tersebut.</p> <p>7. <i>Contact person</i> dari Pemda Sulawesi Selatan untuk koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan dimaksud, adalah sebagai berikut:</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Ibu Hastina Biro Kerja Sama Prov. Sulawesi Selatan HP: 0813-4387-6677</p> <p>email <a href="mailto:hastinadahlan@gmail.com">hastinadahlan@gmail.com</a></p> <p>Bapak Rahmat A.B Biro Kerja Sama Prov. Sulawesi Selatan</p> <p>HP 0813-5578-077</p> <p>Email : <a href="mailto:rahmatalimbachrie@yahoo.com">rahmatalimbachrie@yahoo.com</a></p>	
18.	27 Agustus 2015 Gedung Badan Karantina Pertanian (Barantan)	Rapat Persiapan Pertemuan 29 <sup>th</sup> <i>Session of Asia Pacific Plant Protection Commission (APPPC)</i>	Ditjen Hortikultura, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Perkebunan, Pusat KLN dan jajaran unit teknis Barantan yang merupakan panitia acara Pertemuan APPPC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertemuan APPPC akan diselenggarakan tanggal 7-11 September 2015 di Hotel Padma Resort Legian Bali. Delegasi asing terkonfirmasi sebanyak 44 orang, sementara jumlah delegasi RI masih belum dapat dikonfirmasi karena masih dalam proses menunggu jawaban atas surat permintaan delri ke masing-masing unit teknis lingkup Kemtan.</li> <li>2. Selain itu, akan diselenggarakan pameran pertanian dengan menyediakan 8-10 booth pameran dan juga akan ada acara fieldtrip hari ke-tiga Pertemuan yang akan dilaksanakan di STA Mekar Manik Nadi Kabupaten Karangasem Bali.</li> <li>3. Panitia kegiatan telah dibentuk dengan SK Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Indonesian National Plant Protection Organization, No.1015/Kpts/OT.160/L/8/2015, tanggal 10 Agustus 2015. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh panitia diharapkan menghadiri briefing akhir persiapan yang akan diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 6 September 2015, pukul 19.30, bertempat di Pulmeria Ballroom, Hotel Padma Resort Legian Bali.</li> </ol>	Dalam rangka persiapan selanjutnya, Pusat KLN sebagai panitia persidangan dan panitia <i>drafting committee</i> kiranya dapat hadir dan berperan aktif dalam rapat penyusunan posisi Pertemuan APPPC pada tanggal 1-2 September 2015 di Bogor.

				<p>4. Pihak imigrasi Bandara Ngurah Rai bertanggung jawab terhadap <i>immigration clearance</i> delegasi asing yang tiba dengan terdapatnya counter khusus delegasi Pertemuan APPPC. Delegasi diperkirakan sudah mendarat di Bali pada tanggal 5 dan 6 September 2015. Penjemputan akan dilakukan oleh petugas Barantan Denpasar bekerjasama dengan pihak Hotel Padma.</p> <p>5. Acara <i>opening session</i> akan dilaksanakan pada hari Senin, 7 September 2015, pukul 09.00-10.00, di Pulmeria Ballroom Hotel Padma. Acara akan dibuka secara resmi oleh Kepala Barantan, sementara itu undangan pembukaan akan disampaikan oleh pihak Barantan secara resmi kepada instansi lembaga terkait.</p> <p>6. <i>Dress code</i> yang akan digunakan oleh panitia pada hari pertama adalah pakaian jas formal, sedangkan di hari berikutnya akan menggunakan batik.</p> <p>7. Undangan jamuan makan malam akan disiapkan oleh pihak panitia dan disampaikan kepada delegasi pada saat registrasi. Jamuan makan malam akan diselenggarakan sebanyak 3 kali dengan host Kementan 2 kali dan FAO 1 kali.</p> <p>8. Selain mengundang media lokal di Bali, dipertimbangkan untuk mengundang Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) untuk mempublikasikan hasil jalannya pertemuan tersebut.</p>	
--	--	--	--	--	--

				9. Kepala Barantan sebagai Ketua NPPO Indonesia akan menjadi <i>chairperson</i> dalam Pertemuan tersebut. Terkait bahan materi persidangan akan dibahas lebih lanjut di rapat penyusunan posisi Pertemuan APPPC, tanggal 1-2 September 2015, pukul 09.00 WIB – selesai, di Hotel Salak Bogor.	
19.	27-28 Agustus 2015 Yogyakarta	Workshop Optimalisasi Peran Atase Pertanian Dalam Meningkatkan Perdagangan Komoditas Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atase Pertanian Jepang, Roma, Brussels, Washington</li> <li>- Kemlu</li> <li>- Kemendag</li> <li>- Lingkup Kementan</li> </ul>	<p>1. Direktur Kerjasama Multilateral, Ditjen KPI, Kemendag menyampaikan paparan “Perkembangan Perundingan WTO Pasca KTM Bali”. KTM Bali menghasilkan kesepakatan pada isu <i>trade facilitation</i> serta kemajuan pada beberapa elemen pertanian (<i>public stockholding, general services, export competition</i>) dan pembangunan (<i>monitoring mechanism</i> dan LDC issues). Disampaikan 3 komponen penting dalam perundingan pertanian, yaitu: akses pasar, <i>domestic support</i>, dan <i>export competition</i>.</p> <p>2. Paparan Atani Washington. Tupoksi dan peran: (a) observasi/market intelligent, (b) meningkatkan kerjasama: ekspor (promosi), peluang investasi, pendidikan/pelatihan, penelitian/teknologi pertanian, (c) fasilitasi penyelesaian masalah perdagangan. Atani Washington memiliki area kerja 50 negara bagian AS, 21 negara Amerika Selatan, dan Kanada. Beberapa komoditas unggulan AS – ekspor ke Indonesia: gandum, kedelai, jagung, kapas, pakan hewan, produk dairy, buah-buahan. Peluang peningkatan ekspor Indonesia ke AS: kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao-produk, rempah, the, ikan dan udang, mentega. Peluang dan potensi kerjasama Indonesia – AS: (i) pengembangan ekspor komoditas pertanian,</p>	Pusat KLN akan memantau proses perizinan dan imigrasi para peserta kegiatan tersebut.

				<p>melalui partisipasi aktif pameran/eksibisi/ekspo produk pangan/pertanian, (ii) investasi. Beberapa bantuan proyek: (a) <i>Millenium Challenge Cooperation</i> (MCC), (b) <i>Mondelez International: Cocoa Life</i> Indonesia</p> <p>a. Atani Brussel. Bentuk kegiatan: pelayanan informasi dan data pertanian untuk kepentingan public; kerjasama luar negeri untuk mendukung sekr pertanian bidang pangan, secara bilateral dan multilateral. Strategi: (i) pemetaan permasalahan (kualitas untuk memenuhi standar UE, kualitas untuk persaingan); (ii) promosi (<i>direct link</i>, branding, networking dengan KADIN asing); (iii) investasi <i>logistic</i> di pelabuhan UE; (iv) kerjasama (<i>triangle cooperation</i>); (v) <i>single market</i> ASEAN vs UE; (vi) publikasi riset – <i>scientific</i>.</p> <p>b. Atani Tokyo. Peluang dan tantangan: (i) adopsi berbagai teknologi pertanian melalui berbagai bidang pertanian, (ii) akses pasar produk-produk pertanian melalui peningkatan daya saing, (iii) mendorong investasi bersama di Indonesia melalui pemberian kemudahan perijinan dan penyiapan sarana dan prasarana, (iv) pengembangan kerjasama teknik: bilateral, regional, multilateral yang memiliki kesamaan keanggotaan. Target: (i) meningkatnya ekspor produk pertanian khususnya hortikultura dan tanaman pangan Indonesia ke Jepang, (ii) meningkatnya investasi Jepang di Indonesia melalui joint investment dengan fokus komoditas pertanain berdaya saing tinggi yang dapat memenuhi pasar</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Jepang, (iii) meningkatnya jumlah petani magang yang berkualitas dan perbaikan penanganan program, sebagai salah satu upaya mempercepat alih teknologi dan etos kerja SDM pertanian.</p> <p>c. Peran atani: mempertahankan dan meningkatkan share produk pertanian di pasar negara tujuan, mendorong investasi untuk peningkatan produksi produk pertanian strategis dan produk pertanian bernilai tambah, mendorong investasi untuk pembangunan food estate, menggali potensi pasar untuk pertanian organic, kolaborasi pameran.</p>	
--	--	--	--	--	--

#### KERJASAMA MULTILATERAL

1.	3-4 Agustus 2015 Hotel Horison Ultima Bekasi	Sidang ke-19 <i>Council for Partnership on Rice Research in Asia</i> (CORRA)	Pejabat setingkat Eselon I Kementerian Pertanian dari 17 Negara di Asia	Pertemuan membahas perkembangan terkini penelitian padi dari masing-masing negara anggota juga membahas arah dan fokus penelitian padi dalam 2-3 tahun ke depan diantaranya upaya adaptasi perubahan iklim dan peningkatan produksi melalui mekanisasi dan pengolahan hasil.	Indonesia bersama IRRI akan segera memfinalkan work plan kerja sama dengan untuk periode 2015-2019.
2.	5 Agustus 2015, Bappenas	Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai PHLN Triwulan II Tahun 2015	Dit. Perencanaan dan Pengembangan Bappenas, Dit. Pendanaan Luar Negeri Multilateral Bappenas, Dit. Pendanaan Luar Negeri Bilateral Bappenas, Dit. Evaluasi Akuntansi, dan Setelmen Kemenkeu, Dit. Pinjaman dan Hibah	<p>1. Rapat bertujuan untuk membahas perkembangan kegiatan proyek pinjaman luar negeri Smallholder Livelihood of Development in Eastern Indonesia (SOLID) sampai dengan Triwulan II 2015 dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya.</p> <p>2. Sampai dengan Triwulan II 2015, proyek SOLID telah merealisasikan Rp 21,73 Milyar (15,48%) dari pagu anggaran TA. 2015 Rp 140,40 Milyar sehingga terdapat sisa pagu anggaran yang belum terserap sebesar Rp 118,67 Milyar (84,52%).</p>	Untuk sementara, pelaksana proyek memasukkan anggaran tersebut dalam akun Belanja Barang yang Diserahkan ke Pemerintah Daerah. Terkait masalah ini, Bappenas dan Kemenkeu sepakat untuk mengadakan forum terpisah untuk mencari jalan keluarnya karena yang terkena dampak kebijakan baru Bansos ini tidak hanya proyek SOLID, tetapi hampir

			Kemenkeu, BPKP, Badan Ketahanan Pangan, Biro Perencanaan dan Pusat KLN	3. Mulai tahun 2016, kebijakan baru terkait dana Bantuan Sosial (Bansos) ke masyarakat yang HARUS melalui Kementerian Sosial mulai diterapkan. Sehubungan dengan kebijakan tersebut, proyek SOLID mengalami kesulitan dalam proses penganggaran dan pelaksanaan di lapangan karena sebagian besar dana pemberdayaan masyarakat dalam proyek diberikan dalam bentuk Bansos dan berada dalam satker Kementerian Pertanian.	semua proyek pinjaman luar negeri yang menggunakan metode pemberdayaan masyarakat akan mengalami permasalahan serupa.
3.	6 Agustus 2015 Gedung Radius Prawiro, Lt.6, PKPPIM Kemenkeu	Rapat Pembahasan HCA IFAD: Penyusunan Naskah Urgensi	Kemenlu, Kemenkeu, dan Kementan	Naskah Penjelasan: Pengesahan Perjanjian Negara Tuan Rumah antara Pemerintah Negara RI dan Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) tentang Pendirian Kantor Perwakilan IFAD di Indonesia	Naskah Penjelasan: Pengesahan Perjanjian Negara Tuan Rumah antara Pemerintah Negara RI dan Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) tentang Pendirian Kantor Perwakilan IFAD di Indonesia akan didiskusikan lagi dengan pihak Setneg dan Setkab
4.	7 Agustus 2015, Ditjen Peternakan & Kesehatan Hewan	Rapat Usulan Hibah Biosecurity Engagement Program (BEP) dari USA dan Hibah OSRO/INS/501/USA dari FAO	Setditjen. Peternakan dan Keswa, Dit. Kesehatan Hewan, UPT BB Veteriner Wates DIY, UPT BB Veteriner Maros Sulsel, Biro Hukum dan Informasi Publik, dan Pusat KLN	1. Rapat bertujuan untuk membahas usulan hibah dari USA dengan judul Biosecurity Engagement Program (BEP) dan usulan hibah dari FAO dengan judul Strengthening National Capacity to Prevent and Control Emerging and Re-emerging Pandemic Threats including Influenza A in Indonesia (OSRO/INS/501/USA). 2. Hibah BEP dari USA merupakan tindak lanjut dari kerjasama penelitian antara UPT lingkup Ditjen. Peternakan dan Keswan dengan USA dalam meningkatkan aspek biosecurity pada laboratorium-laboratorium pengujian penyakit hewan, khususnya untuk mencegah terjadinya	Sebagai tindak lanjut, perwakilan Pusat KLN menyampaikan perlunya dibuat ringkasan hibah dan urgensinya untuk disampaikan kepada Bapak Sekretaris Jenderal sebagai bahan persetujuan beliau terhadap kedua usulan hibah dimaksud.

				<p>penularan penyakit hewan kepada manusia baik yang bekerja dalam laboratorium maupun masyarakat sekitar lokasi laboratorium.</p> <p>3. Hibah OSRO/INS/501/USA dari FAO bertujuan untuk membentuk sebuah sistem pemantauan yang kompeten untuk penyakit hewan menular dan digabungkan dengan diagnosis laboratorium yang cepat dan akurat sehingga kerugian peternak dapat dikurangi dan penyebaran penyakit hewan menular dapat dibatasi. Hibah ini direncanakan menelan anggaran sebesar USD 16.000.000 (USD 4.000.000 per tahun) untuk periode 4 tahun mulai 1 Oktober 2015 s.d. 30 September 2019 dengan lokasi mencakup seluruh Indonesia. Hibah dari FAO ini biasanya akan dilaksanakan oleh FAO sendiri dan Ditjen. Peternakan dan Keswan bertindak sebagai supervisor/pengawas.</p>	
5	7 Agustus 2015 Gedung Radius Prawiro, Lt.6 PKPPIM, Kemenkeu	Rapat Pembahasan HCA IFAD: Penyusunan rancangan Perpres tentang HCA IFAD di Indonesia	Kemenlu, Kemenkeu, dan Kementan dan Kemenkumham	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Perjanjian Negara Tuan Rumah antara Pemerintah RI dan Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) tentang Pendirian Kantor Perwakilan IFAD di Indonesia	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Perjanjian Negara Tuan Rumah antara Pem RI dan Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) tentang Pendirian Kantor Perwakilan IFAD di RI akan didiskusikan lagi dengan pihak Setneg dan Setkab



6.	7-8 Agustus 2015 BB Biogen, Bogor	Rapat Pembahasan Bahan Diseminasi Kajian READ-IFAD	PSE, BPPSDMP, PKLN Kemtan dan IPB	Bahan/materi Diseminasi Program BLN-IFAD, yaitu: (i) Paradigma Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan: Perspektif Global dan Implikasinya untuk Indonesia (Prof Wayan); (ii) Tinjauan Tematik untuk Mendukung Sukses dalam Replikasi Proyek READ (Prof Firdaus); (iii) Penanggulangan Kemiskinan dengan READ Model (Pimpro READ); dan (iv) Success Story READ Program di Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah (Manajer Program READ Kabupaten Poso)	Bahan/materi Diseminasi Program BLN-IFAD selanjutnya akan dipaparkan pada pertemuan Diseminasi BLN IFAD pada tanggal 19- 20 di Pontianak, Kalimantan Barat
7.	7 Agustus 2015 RR. Executive Lounge, Bappenas	Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuan G20 DWG ke-4	Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kemenlu, Kementan, Kemenkeu, Bank Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja, Kemenkes, BKPM dan OJK.	Kesimpulan hasil pertemuan: 1. Terdapat 17 <i>goals</i> dalam SDGs, yang terakhir adalah <i>global partnership</i> , perlu dilihat kembali keterkaitan 16 <i>goals</i> yang lain dengan G20 DWG, agar dapat saling mengisi dan dipetakan. 2. Terkait <i>Financing for Development</i> (FFD) sepertinya masih terlihat dua posisi, yaitu <i>means of implementation</i> dari OECD dan <i>signal</i> yang akan didiskusikan di COP nanti.  Beberapa catatan terkait masukan-masukan akan ditindaklanjuti dalam pertemuan yang lebih khusus, terkait <i>rating agency</i> dan CDD yang akan mengarah kepada relaksasi dari Basel Committee. Bank Indonesia sudah menggarisbawahi <i>progress</i> dan catatan khusus. Permasalahan <i>financial inclusion</i> jangan dilupakan, namun remitansi yang sudah menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan juga harus mendapatkan perhatian khusus. Kementerian Keuangan dalam masukan terkait <i>BEPS Action Plans</i> , yang harus didukung, netral maupun tidak didukung. Kementerian Pertanian dalam masukan terkait nutrisi dan pentingnya pemberdayaan petani kecil, tentang posisi Delri terkait <i>food waste</i> . BKPM kembali menekankan terkait <i>one stop service</i> .	1) Terkait <i>follow up actions</i> , diharapkan K/L segera memberikan masukan dan komentar terkait <i>progress update</i> serta memformulasikan posisi Indonesia dalam agenda- agenda tersebut. 2) Akan dilakukan komunikasi dan koordinasi terus menerus, serta dilakukan <i>follow up</i> teknis terkait bahan yang sudah dibicarakan.

8.	12 Agustus 2015, di RR Pusat KLN	Rapat Persiapan Pemantauan dan Evaluasi Lapangan Proyek Pinjaman Luar Negeri Lingkup Kementerian Pertanian	Peserta rapat lingkup Pusat KLN	Fokus pemantauan dan evaluasi Pinjaman LN kali ini pada Proyek SMARTD dan Proyek WISMP2. Kedua proyek ini masih on-going sehingga diharapkan masukan dari hasil pemantauan dan evaluasi lapangan ini dapat digunakan untuk perbaikan pelaksanaan kedua proyek ke depannya.	Setelah pemantauan dan evaluasi lapangan ini akan diadakan pertemuan dengan pelaksana proyek untuk memaparkan hasil temuan di lapangan.
9.	13-14 Agustus 2015 Hotel Sensa, Bandung	Rapat Koordinasi Pembahasan dan Perumusan Cetak Biru (Blue Print) Peran Indonesia di G-20	Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Bappenas, Kemendag, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementan, Kementerian ESDM, KPK, BI, OJK, BKPM dan Universitas Parahiyangan	Cetak Biru ( <i>blue print</i> ) Peran Indonesia di G-20 dan Matriks Implementasi Komitmen Indonesia pada G-20	Kementan dimohon dapat melengkapi 2 matriks yaitu: (i) Matriks Implementasi yang berisi tabel acuan / rujukan agenda FSN, target, capaian, strategi, peluang dan tantangan yang dapat diisi sesuai dengan target dalam agenda pembangunan Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Tabel ini sifatnya mengidentifikasi existing action dan komitmen pada tahun 2015 (annually), serta peluang dan permasalahan dari sisi Indonesia dalam mengimplementasikan rencana aksi G20 tersebut. Matriks ini akan masuk dalam buku II Cetak Biru; (ii) Matriks 2 akan digunakan untuk masukan dalam buku I Cetak Biru yang saat ini sedang disusun oleh pemerintah, dikoordinasikan oleh Kemenlu dibantu tim penulis dari Universitas Parahiyangan Bandung.

10.	13-14 Agustus 2015 Sukabumi dan Cianjur	Pemantauan dan evaluasi lapangan proyek SMARTD di Balittri Sukabumi dan proyek WISMP2 di Cianjur.	Pelaksana proyek SMARTD, pelaksana proyek WISMP2, dan Pusat KLN	<p>1. Balittri menggunakan dana SMARTD untuk membangun gedung laboratorium terpadu berikut peralatan laboratoriumnya. Dari hasil pantauan lapangan, terlihat kualitas bangunan yang diadakan kurang memuaskan. Misalnya terlihat dari beberapa bagian dinding yang retak-retak, pengecatan yang tidak rapi, dan beberapa bagian keramik yang sudah lepas. Hal ini sangat disayangkan mengingat umur bangunan belum mencapai 2 tahun.</p> <p>2. Proyek WISMP2 di Cianjur dapat dikategorikan sebagai yang terbaik. Hal ini terlihat dari capaian realisasi keuangan yang mencapai target. Hambatan utama dalam mencairkan dana hibah WISMP2 dari Ditjen. Perimbangan Keuangan Kemenkeu berhasil diatasi, yaitu dengan mendelegasikan surat kuasa penggantian hibah dari Bupati kepada semua kepala SKPD pelaksana proyek di Kabupaten Cianjur (Kepala Bappeda, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Pertanian).</p>	Hasil temuan di lapangan ini akan diverifikasi dalam rapat yang mengundang pelaksana proyek SMARTD dan WISMP2.
11.	18 Agustus 2015 Kementerian Luar Negeri	ICCO: Relokasi Sekretariat ICCO (Menteri Perdagangan Pantai Gading)	Deputi Perkebunan dan Hortikultura Kemenko Perekonomian, Dit. APEC dan Organisasi Internasional Lainnya Kementerian Perdagangan, Dewan Kakao Indonesia dan PKLN Kementerian Pertanian.	<p>Pada bulan Mei 2002, ICCO menerima tawaran relokasi Sekretariat ICCO dari Pemerintah Pantai Gading dengan jaminan fasilitas yang memadai.</p> <p>Relokasi ke Pantai Gading belum dapat terlaksana dikarenakan isu keamanan, maka sejak Juni 2013, ICCO telah menempati gedung sekretariat baru di Westgate House, Ealing, London WS 1YY, dengan kontrak sewa gedung selama 10 tahun, dan diberikan bebas masa sewa (<i>rent – free period</i>) selama 15 bulan, dengan kemungkinan memutus kontrak (<i>break clause</i>) pada akhir tahun keempat.</p>	Sebagai tindak lanjut, Kementerian Luar Negeri akan menyampaikan surat permintaan posisi resmi tentang rencana relokasi kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk selanjutnya disusun sebagai posisi Pemerintah Indonesia.

				Sehubungan dengan hal tersebut, rapat membahas posisi Indonesia terkait rencana relokasi dimaksud. Terdapat tiga opsi yang dapat dipilih yaitu: <b>mendukung, menolak, atau abstain</b>	
12.	19-21 Agustus 2015 BKPP Pontianak	Diseminasi Lesson Learned Hasil Kajian Proyek IFAD	Unit Eselon I lingkup Kementan, Kemenlu, Kemenkeu, Bappenas, Pemda Kalbar, Pemda Kabupaten Sanggau dan Sambas	Penyampaian paparan Diseminasi Program BLN-IFAD, yaitu: (i) Paradigma Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan: Perspektif Global dan Implikasinya untuk Indonesia (Prof Wayan); (ii) Tinjauan Tematik untuk Mendukung Sukses dalam Replikasi Proyek READ (Prof Firdaus); (iii) Penanggulangan Kemiskinan dengan READ Model (Pimpro READ); dan (iv) Success Story READ Program di Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah (Manajer Program READ Kabupaten Poso)	Kegiatan Diseminasi serupa juga akan dilakukan di Kupang, Propinsi NTT pada tanggal 1-3 September 2015 mengingat replikasi proyek READ dilakukan di dua propinsi yaitu Kalbar dan NTT.
13.	9-21 Agustus 2015 Jakenan Pati	Pemantauan dan evaluasi lapangan proyek SMARTD di Balai Penelitian Lingkungan Pertanian Jakenan Pati.	Pelaksana proyek SMARTD pusat dan Balintan serta Pusat KLN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Balingtan mendapat alokasi pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian seperti embung, kandang sapi, pagar pembatas, saluran air, fasilitas gudang, dan jalan paving blok. Semua bangunan tersebut terlihat dalam kondisi baik.</li> <li>2. Dalam diskusi, disampaikan bahwa kualitas bangunan memang dijaga sebaik-baiknya oleh Balingtan dengan membentuk tim penanggung jawab untuk setiap bangunan yang dibangun. Bila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dalam pembangunan tersebut, tim akan melaporkannya ke pengawas proyek untuk segera ditindak lanjuti. Dengan sistem ini, kualitas bangunan dapat dijaga.</li> </ol>	Hasil temuan di lapangan ini akan diverifikasi dalam rapat yang mengundang pelaksana proyek SMARTD.

14.	20 Agustus 2015 FAO Office	<i>Invitation to the Technical Consultation Meeting on the Country Programming Framework (CPF)</i>	Kepala FAOR Mr. Mark Smulder didampingi Ms. Nanai program officer FAO RAP Bangkok, Mr. Ageng program officer FAO Jakarta dan staf FAO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sehubungan adanya draft Indonesia FAO <i>Country Programming Framework 2015-2019 (zero draft)</i>, disampaikan oleh Mr. Mark Smulder (FAOR) bahwa draft tersebut merupakan hasil tindaklanjut workshop CPF tanggal 22 April 2015 di Hotel Millenium.</li> <li>2. Pihak FAOR berharap draft final CPF selesai pada akhir bulan September 2015.</li> <li>3. Kementerian Pertanian diwakili oleh Pusat KLN (Kasubid PBB), Badan Litbang (Kasubag Kerja sama) dan BKP (Kasubag Kerja sama)</li> <li>4. Draft CPF ini disusun oleh konsultan yang ditugaskan oleh FAO. Data-data yang diperoleh selain berdasarkan RPJMN juga RENSTRA KEMTAN 2015-2019 dan hasil konsultasi dengan beberapa pejabat di Kementerian Pertanian termasuk Kepala Biro Perencanaan.</li> <li>5. Program prioritas yang masuk dalam pembangunan pertanian termasuk tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, antara lain; (i) mencapai kedaulatan pangan, (ii) mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan bioindustri, (iii) mewujudkan kesejahteraan petani, Dan (iv) mewujudkan reforma birokrasi. Target Yang akan dicapai antara Lain; (i) swasembada beras, jagung, dan kedelai dan meningkatkan produksi daging dan gula, (ii) peningkatan diversifikasi pangan, (iii) meningkatkan nilai tambah komoditas, daya saing untuk memenuhi pasar ekspor , dan substitusi impor, (iv) penyediaan bahan baku untuk bioindustri dan bioenergi, dan (v) peningkatan pendapatan petani keluarga.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil diskusi akan dimasukan sebagai draft I dan segera akan disampaikan kepada Kemtan</li> <li>2. Pusat KLN akan mengadakan rapat koordinasi terkait draft CPF dari FAO</li> </ol>
-----	-------------------------------	--	---	---	---

15.	21 Agustus 2015 Puslitbangnak, Bogor	Kaji Ulang RAN-GRK	Ditjen PSP, Ditjen TP, Ditjenbun, Ditjen PPHP, Ditjen PKH, Birocan, Badan Litbang dan PKLN Kementan	Usulan matriks sebagai lampiran revisi Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK dan Laporan Hasil Kinerja sampai tahun 2014 (SRI, SLPTT, dan data ternak)	Matriks akan dilengkapi oleh unit-unit teknis yang terkait RAN-GRK
16.	24 Agustus 2015 BB Biogen, Bogor	Rapat persiapan <i>International workshop identifiers for rice Germplasm and Co-Development and Transfer Technologies</i>	Pusat KLN, Sekretariat Badan Litbang Pertanian, BB Biogen dan Kasi Penyeleksian Hasil Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>International workshop identifiers for Rice Germplasm</i> akan dilaksanakan di Hotel Santika Bogor, tanggal 1 – 2 September 2015 dan <i>International workshop Co-Development and Transfer Technologies</i> akan dilaksanakan di Hotel Santika Bogor, tanggal 3 September 2015.</li> <li>2. Workshop akan dibuka oleh Kepala Badan Litbang Pertanian dengan Sekretaris Badan Litbang Pertanian sebagai alternate.</li> <li>3. Pusat Kerja Sama Luar Negeri telah bersurat ke: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Sekretariat Kabinet terkait persetujuan penyelenggaraan acara dan sudah mendapat persetujuan;</li> <li>- Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian terkait pengurusan Visa Kunjungan saat kedatangan (<i>Visa on Arrival</i>) bagi peserta dari negara yang memerlukan;</li> <li>- Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (BAINTELKAM) POLRI</li> <li>- Kepala Pusta Kepatuhan, Kerja Sama dan Informasi Perkarantinaaan, Badan Karantina Pertanian perihal bantuan pejabat/staf untuk membantu kelancaran pada saat kedatangan dan kepulangan para peserta di bandara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta.</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil dari BB Biogen didampingi oleh wakil dari Sekretariat Badan Litbang Pertanian akan hadir pada presentasi kegiatan workshop di kantor Imigrasi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015.</li> <li>2. Sekretariat Badan Litbang pertanian akan mengirimkan surat undangan kepada peserta workshop di dalam negeri dan data peserta dari dalam negeri ke Pusat KLN Kemtan untuk di teruskan ke Kantor Imigrasi.</li> </ol>

				<p>4. Sekretariat Badan Litbang Pertanian menyampaikan bahwa sedang memproses surat undangan untuk peserta workshop dari dalam negeri.</p> <p>5. Sekretariat BB Biogen melaporkan hal-hal terkait undangan untuk peserta workshop dari luar negeri, Rundown Acara, denah ruangan dan konsep posisi peserta dan Kepala Badan Litbang Pertanian beserta eselon 2 terkait pada saat pelaksanaan workshop, substansi workshop, teknik penjemputan dan kepulangan peserta workshop.</p>	
17.	24 Agustus 2015 RR PKLN Kementan	Rapat Koordinasi Lingkup Kementan Agenda G20 Pembahasan Matriks Implementasi untuk Cetak Biru	Biroren, Pusdatin, BKP, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen PSP, BPPSDMP, Badan Litbang	<p>Kesimpulan hasil pertemuan:</p> <p>1. Saat ini Pemri sedang menyusun buku Cetak Biru peran Indonesia pada G20. Terkait hal tersebut, terdapat dua matriks yang perlu dipersiapkan oleh Kementerian Pertanian yaitu:</p> <p>(i) Matriks Implementasi yang berisi tabel acuan / rujukan agenda FSN, target, capaian, strategi, peluang dan tantangan yang dapat diisi sesuai dengan target dalam agenda pembangunan Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Tabel ini sifatnya mengidentifikasi existing action dan komitmen pada tahun 2015 (annually), serta peluang dan permasalahan dari sisi Indonesia dalam mengimplementasikan rencana aksi G20 tersebut. Matriks ini akan masuk dalam buku II Cetak Biru; (ii) Matriks 2 akan digunakan untuk masukan dalam buku I Cetak Biru yang saat ini sedang disusun oleh pemerintah, dikoordinasikan oleh Kemenlu dibantu tim penulis dari Universitas Parahyangan Bandung.</p>	PKLN akan menyampaikan secara resmi surat permintaan masukan atas matriks implementasi berdasarkan hasil kesepakatan rapat untuk kemudian disampaikan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Bappenas pada tanggal 26 Agustus 2015.

				2. Selanjutnya menindaklanjuti pertemuan persiapan G20 DWG ke 4 yang dipimpin oleh Bapak Wismana Adi Suryabrata, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan di Bappenas tanggal 7 Agustus 2015, diharapkan dapat disiapkan masukan yang lebih teknis terhadap <b>second draft Action Plan G20</b> untuk FSN oleh Unit Teknis Kementan terkait.		
18.	26 Agustus 2015 RR. Biro OK Kementan	Rapat Persiapan Bahan Posisi Delri pada Sidang EB-115 IFAD	Bappenas, Kemenkeu, BPPSDMP	BKF BKP,	<p>Kesimpulan hasil pertemuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sidang ke-115 <i>Executive Board</i> (EB) IFAD akan berlangsung pada tanggal 15 – 16 September 2015 di Roma, Italia.</li> <li>2. Bapak Sekjen Kementan selaku <i>Executive Director</i> IFAD di Indonesia telah menerima undangan resmi dari IFAD dan dijadwalkan akan hadir pada pertemuan dimaksud.</li> <li>3. Berdasarkan provisional agenda, sidang EB-115 akan membahas sepuluh mata agenda untuk disetujui/<i>approval [A]</i>, tujuh mata agenda untuk dibahas/<i>review [R]</i> serta tiga mata agenda sebagai informasi [I].</li> <li>4. Beberapa agenda penting yang akan dibahas yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Program Kerja dan Anggaran IFAD Tahun 2016 dan Rencana Indikatif Tahun 2017 – 2018</li> <li>- Revisi Kebijakan Evaluasi IFAD terkait <i>timeline</i> penyajian laporan</li> <li>- Pembahasan Usulan 9 (Sembilan) Proyek dari 7 (tujuh) Negara diantaranya China dan Filipina</li> <li>- Pembahasan Draft resolusi <i>Principles of Conduct for Representatives</i></li> </ul> </li> </ol>	PKLN akan mengirimkan secara resmi surat permintaan masukan sesuai dengan pembagian maktris posisi sebagaimana tupoksi untuk kemudian dikompilasi dan menjadi bahan final posisi Delri pada Sidang EB-115 IFAD.



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan Rencana <i>Country visits Executive Board</i> 2016-2018</li> <li>- Pembahasan <i>timeline</i> submisi dokumen sidang EB</li> </ul> <p>Serta beberapa agenda rutin diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Komite Evaluasi</li> <li>b. Laporan Komite Audit</li> <li>c. Laporan <i>Ad Hoc Working Group on Governance</i> (WGG)</li> <li>d. Status Kontribusi Negara Anggota (perkembangan <i>Replenishment</i> 9 dan <i>Replenishment</i> 10)</li> </ul>	
19.	26 Agustus 2015 Wisma Bakrie 2 Jakarta	Rapat Pembahasan Draft Cetak Biru G-20 Development Working Group	Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Bappenas, Kemendag, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementan, Kementerian ESDM, KPK, BI, OJK, BKPM dan Universitas Parahiyangan	Draft Cetak Biru G-20 Development Working Group	<a href="#">Pusat KLN Kementan akan menyampaikan ke Bappenas</a> Matriks 1 Implementasi yang berisi tabel acuan / rujukan agenda FSN, target, capaian, strategi, peluang dan tantangan dan Matriks 2 akan digunakan untuk masukan dalam buku I Cetak Biru yang saat ini sedang disusun oleh pemerintah, dikoordinasikan oleh Kemenlu dibantu tim penulis dari Universitas Parahiyangan Bandung dari unit-unit teknis lingkup Kementan

20.	26 Agustus 2015 Hotel Sofyan Jakarta	Persiapan Pelaksanaan Retreat isu WTO Jenewa	Kemenko Perekonomian, Kemendag, Kemenkeu, Kemen PPN/BAPPENAS, KKP, Kementan, Kemenperin, BULOG	Keberhasilan anggota WTO untuk mensukseskan KTM WTO ke-10 Nairobi 2015, akan sangat tergantung perkembangan dan tingkat ambisi perundangan pada isu-isu utama DDA yaitu pertanian, ases pasar produk non pertanian dan sektor jasa.	Pelaksanaan Retreat akan dilaksanakan tanggal 2-4 September 2015 di Jenewa dengan tujuan untuk mendapatkan bahan masukan bagi penyusunan posisi runding yang tepat sesuai dengan kepentingan nasional yang menjadi pedoman bagi perunding di komite perundingan WTO.
21	26 Agustus 2015 RR Biro Perencanaan Kemtan	Rapat Pembahasan Dampak El Nino bersama Lembaga UN di Indonesia	Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kepala FAOR Mr. Mark Smulder didampingi, Mr. Ageng <i>program officer</i> FAO Jakarta dan Ms. Jiwon Rhee FAOR, WFP Country Rep. UNICEF Rep., UNOCHA Rep., FAO Consultant (on behalf UNORCID), UNRC, WHO, dan wakil IMF. Kepala Pusat KLN Kemtan, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, wakil Direktorat Perlindungan Ditjen TP, wakil Direktorat Pengelolaan Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga UN di Indonesia telah membentuk UN Working Group (UNWG) on El Nino, yang bertujuan memberikan dukungan dan koordinasi kepada pemerintah RI untuk mengantisipasi dampak mitigasi El Nino, tidak hanya untuk sektor pertanian, kehutanan, dan sumber air, tetapi juga untuk ketahanan pangan rumah tangga, nutrisi, keamanan pangan dan kondisi kesehatan.</li> <li>2. Bapak Sekjen menyampaikan terima kasih kepada Tim UNWG on El Nino (UNWG) atas kunjungannya, dan berharap dapat bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam rangka penanggulangan daerah rawan kekeringan.</li> <li>3. Daerah-daerah yang terkena dampak El Nino antara lain: Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, Bali, NTB/NTT dan Sulawesi Selatan.</li> <li>4. Sampai akhir Agustus 2015, areal padi yang terkena puso seluas 35.202 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kekeringan sebagai dampak El Nino perlu mendapat perhatian khusus agar dampaknya tidak meluas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UNWG akan mengumpulkan masukan-masukan dari instansi terkait seperti Kemtan, KKP, Kementerian LH, Kehutanan, BMKG, dan Bappenas.</li> <li>2. UNWG akan memformulasikan kegiatan yang pas untuk mendukung Pemri dalam menangani masalah kekeringan yang diakibatkan oleh badai El Nino.</li> </ol>

			Irigasi Ditjen PSP, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Ditjen PSP, wakil Balai Agroklimat Badan Litbang Pertanian, dan Pusat KLN Kemtan.	<p>5. Menurut FAO potensi dampak kekeringan dapat terjadi pada banyak sektor termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan harga-harga makanan &amp; air</li> <li>- Memburuknya situasi kesehatan &amp; gizi</li> <li>- Mengurangi pendapatan &amp; meningkatkan Kemiskinan</li> <li>- Peningkatan dampak lingkungan (menipisnya sumber daya air; kebakaran hutan dll)</li> </ul> <p>6. UNWG berharap dapat berkontribusi dalam hal bantuan teknis (<i>technical assistance</i>) untuk Pemri guna mengantisipasi dan penanggulangan masalah kekeringan.</p>	
22.	27 Agustus 2015 Badan Karantina Pertanian	Rapat koordinasi sidang APPPC (Asia and Pacific Plant Protection Commission) sesi 29 di Bali	Badan Karantina Pertanian, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Ditjen Tanaman Pangan, Pusat KLN Kemtan dan Kementerian Luar Negeri	<p>1. Sidang APPPC sesi ke-29 akan dilaksanakan di Hotel Padma, Bali pada tanggal 7 – 11 September 2015.</p> <p>2. Peserta sidang terdiri dari 25 negara dengan jumlah peserta 100 orang.</p> <p>3. Pertemuan akan berlangsung plenary dan pada tanggal 9 September 2015 akan dilakukan breakout discussion 3(tiga) standing committee yaitu SC on Plant Protection and Quarantine, SC on Pesticide dan SC on IPM</p> <p>4. Pusat KLN mendapat tugas sebagai panitian seksi materi sidang dan seksi drafting committee</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat koordinasi selanjutnya tanggal 6 September 2015 di Ballroom Hotel Padma, Bali.</li> <li>- Penyelesaian country paper oleh delegasi dari Indonesia akan dikoordinir oleh Badan Karantina Pertanian.</li> </ul>
23	28 Agustus 2015 Ball Room 3 IPB Convention Center	FGD Hasil-hasil Penelitian Sawit	Kemenko Perekonomian, Kementan, Kemdag, Kemen ESDM, Kemenperin, Dinas Perkebunan Propinsi, Asosiasi dan swasta	<p>1. Minyak sawit sangat fleksibel digunakan dalam berbagai macam produk pangan.</p> <p>2. Efisien, paling terjangkau di seluruh dunia dengan produktivitas tinggi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minyak sawit yang dikonsumsi diet sehat yang seimbang tidak menyebabkan</li> <li>• peningkatan resiko penyakit kardiovaskular.</li> </ul>

				3. Kompetitor minyak sawit (minyak kedelai, minyak jagung dan minyak bunga matahari) mengasumsikan negatif bahwa minyak sawit dapat mengganggu kesehatan manusia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minyak sawit merah yang kaya karotenoid mampu melindungi jantung terhadap stress oksidatif, demikian juga dengan kombinasi caretonoids, lycopene dan berbagai komponen minor bio-aktif .</li> </ul>
23.	31 Agustus 2015 Bappenas	Kick off meeting Finalisasi Desain proyek Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project for Western and Eastern Indonesia (IPDMIP-W/E)	Bappenas, Kemenkeu, Kemen PUPERA, Kemendagri, ADB, IFAD, BPPSDMP, Biro Perencanaan, dan Pusat KLN.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat ini merupakan pertemuan pertama dalam rangka misi ADB dan IFAD untuk menyelesaikan desain proyek IPDMIP.</li> <li>Proyek ini direncanakan menggunakan pinjaman LN sekitar USD 900 juta dan akan dibiayai oleh ADB USD 600 juta dan IFAD USD 100 juta. Masih terdapat kekurangan biaya sebesar USD 200 juta. ADB menyatakan siap untuk menutupi kekurangan biaya tersebut.</li> <li>Dana dari IFAD hanya untuk komponen pertanian, yaitu komponen I, sementara dana ADB untuk komponen lainnya.</li> <li>Terdapat permasalahan di IFAD terkait mekanisme hibah on-granting yang mana tidak mengharuskan daerah untuk mengirimkan bukti-bukti realisasi anggaran sementara mekanisme di IFAD mengharuskan pengiriman bukti-bukti realisasi anggaran.</li> </ol>	Terkait mekanisme on-granting, perlu pembicaraan lebih lanjut antara Ditjen. Perimbangan Keuangan dengan Kemen PUPERA, Bappenas, dan IFAD

**SUB BAGIAN TATA USAHA DAN ATANI**

1.	10-11 Agustus 2015 di Pusat Perpustakaan Bogor	Pembahasan Konsep Permentan mengenai rincian tugas Eselon III dan IV Biro KLN Tahun 2015	Pusat KLN	<p>1. Bagian Bilateral Bagian bilateral diharapkan melihat kembali tentang konsep Permentan tersebut terutama terkait dengan adanya Sub Bagian PHLN makan perlu kejelasan apakah peran SKR, JICA &amp; KOICA secara kerjasama teknis masing ditangani oleh Bagian Bilateral namun setelah proyek akan melibatkan Sub Bagian PHLN</p> <p>2. Bagian Regional</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sub Bagian Intra Kawasan : Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) harus disebut dalam rincian tugas intra kawasan</li><li>- Non ASEAN apakah disebutkan dan dijelaskan forum-forum kerja sama didalamnya serta menentukan apakah kerja sama UN-CAPSA, UN-ESCAP dan CSAM tetap di bawah Non ASEAN atau masuk ke Sub Bagian PPP di bawah Bagian Multilateral</li><li>- ASEAN perlu menyebutkan secara kerja sama dibawanya (AMAF+3, ASEAN-Cina, ASEAN-India, ASEAN-New Zealand, ASEAN Jerman dan ASEAN-GCC</li></ul> <p>3. Bagian Multilateral</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dari awal dapat dilakukan pembagian siding-sidang yang ditangani oleh Sub Bagian di Bagian Multilateral</li><li>- Diharapkan Bagian Multilateral dapat membuat list siding-sidang yang ditangani oleh Bagian Multilateral, selama ini dan antisipasi tupoksi Direktorat Pemasaran Internasional yang nantinya ditangani oleh Bagian Multilateral</li></ul>	
----	--	--	-----------	--	--

				4. Bagian Pengeolahan PHLN & Atase Pertanian Selama ini PHLN berada di Sub Bidang Administrasi dan Perencanaan, oleh karena itu diharapkan apakah Bagian Multilateral dapat melihat apakah Tupoksi dipegang selama ini sudah tercantum dalam Sub Bagian Atani, sejauh mana peran PHLN Bilateral terhadap kerja sama teknis (SKR, JICA dan KOICA)	
2.	12-13 Agustus 2015 Hotel Royal Ambarrukmo Yogya	Persiapan Workshop Optimalisasi Peran Atase Pertanian Dalam Meningkatkan Perdagangan Komoditas Pertanian	Dinas Pertanian Yogyakarta dan Royal Ambarrukmo	<p>Pertemuan dengan Ir. Sasangko Kepala Dinas Pertanian Prov. Yogyakarta, Kepala Dinas permintaan maaf bahwa tanggal 27 Agustus 2015 tidak bisa hadir untuk memberikan Sambutan Selamat Datang sebagai tuan rumah, dan akan diwakili oleh Ibu Purwanti Rahayuningtyas Sekretaris Dinas Prov. Yogyakarta.</p> <p>Pertemuan dengan Bapak Putra Marketing Hotel Royal Ambarrukmo untuk pengecekan ruangan Workshop untuk kapasitas 100 (seratus) orang, Menu yang disajikan, kamar bagi Narsumber dan Panitia.</p>	
3.	14-15 Agustus 2015 BLPP Ciawi - Bogor	Rapat koordinasi Rancangan Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Lingkup Kementan	Lingkup Eselon I Kementan	<p>Pembahasan Rencana Revisi Permentan tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Kementan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 4, Jumlah Jam Kerja 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu 37,5 jam ditetapkan ada 2 wacana sebagai berikut :</li> </ul> <p>Hari Senin - Kamis : Jam 08.00 - 16.00 Waktu Istirahat : Jam 12.00 - 12.30</p>	Diharapkan kegiatan e-PUPNS ini dapat dianggarkan pada TA 2016 pada Unit Eselon II Masing-masing.

				<p>Hari Jum'at : jam 08.00 - 16.30 Waktu Istirahat : Jam 12.00 - 13.00</p> <p>Hari senin - Kamis : Jam 08.00 - 16.30 Waktu Istirahat : Jam 11.30 - 12.30</p> <p>Hari Jum'at : Jam 08.00 - 17.00 Waktu Istirahat : jam 11.30 - 13.00</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 8 menjadi pasal 3</li> <li>- Pasal 10, CPNS diberikan Tukin 50% dari Tukis pada kelas jabatan sebagai berikut : Gol III dibayarkan dikelas jabatan 5 Gol II dibayarkan dikelas Jabatan 4 Gol I dibayarkan dikelas Jabatan 3</li> </ul> <p>Bagi CPNS yang belum diangkat menjadi PNS dan belum ditetapkan ke dalam jabatan diberikan 50%</p> <p>Bagi CPNS yang telah diangkat dan diangkat dalam jabatan diberikan Tukin sesuai besaran Jabatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 11 ayat 3, Tukin bagi pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar disetarakan kedalam jabatan fungsional umum sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelas jabatan 7 untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar S3</li> <li>- Kelas jabatan 6 untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar S2</li> </ul> </li> </ul>	
--	--	--	--	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelas jabatan 5 untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar S1 atau D-IV</li> <li>- Kelas jabatan 4 untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar D-III, D-II atau D-I</li> </ul> <p>Klausul tambahan untuk jabatan fungsional umum</p>	
4.	21 Agustus 2015 RR Lantai III Kanpus Kementan	Menghadiri Sosialisasi Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik	Perwakilan Eselon I Lingkup Kementan dan Eselon II lingkup Setjen Kementan	<p>Beberapa catatan/hasil dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku pembina dan penyelenggara Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah, serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan system Informasi Aparatur Sipil Negara.</li> <li>b. Dalam rangka penerapan Sistem ASN berbasis Teknologi Informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, aman dan akurat maka perlu dilakukan pendataan ulang PNS secara online dan terintegrasi antara Instansi Pemerintah</li> <li>c. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pendataan Ulang PNS secara elektronik tahun 2015 diatur tatacara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu :</li> </ol>	



				<p>Ruang Lingkup e-PUPNS adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Pendaftaran Pendataan Ulang PNS</li> <li>2. Prosedur Pengisian PUPNS</li> <li>3. Kewenangan Verifikasi Data</li> <li>4. Prosedur Verifikasi Data</li> <li>5. Prosedur Administrator PUPNS</li> <li>6. Prosedur Bantuan Sistem PUPNS</li> <li>7. Persiapan pelaksanaan e-PUPNS oleh user admin system paling lambat akhir bulan Agustus 2015 (Biro OKE), pengisian formulir dilakukan sampai dengan akhir November 2015 dan proses verifikasi dilakukan sampai dengan akhir bulan Desember 2015</li> <li>8. Penanggung jawab pelaksanaan e-PUPNS Nasional adalah BKN dan dapat membentuk Tim Nasional pelaksanaan e-PUPNS. Pimpinan instansi Pusat/Daerah data membentuk e-PUPNS terdiri dari user admin system verifikasi dan executive</li> <li>9. BKN akan menyediakan buku petunjuk dan dapat diunduh di website <a href="http://www.bkn.go.id">www.bkn.go.id</a> dan direncanakan akan melakukan launching dan pelatihan teknis pengisian e-PUPNS pada tanggal 28 Juli 2015 di Ciawi Bogor yang akan dilaksanakan oleh BKN</li> <li>10. Apabila PNS tidak melaksanakan pemutahirkan data pada periode yang telah ditentukan, data PNS tersebut akan dikeluarkan dari Database Kepegawaian Nasional dan berakibat</li> </ol>	
--	--	--	--	--	--

				<p>pelayanan mutasi kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses, dianggap pension dan tidak dapat fasilitas selaku PNS</p>	
5	27-28 Agustus 2015 Hotel Royal Ambarrukmo Yogya	<p>Pelaksanaan Workshop Optimalisasi Peran Atase Pertanian Dalam Meningkatkan Perdagangan Komoditas Pertanian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atani Tokyo,Roma, Brussel dan Washington</li> <li>- Kemenlu</li> <li>- Kemendag</li> <li>- Dinas Pertanian Provinsi Jateng, Bali dan Yogya</li> <li>- Lingkup Kementan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paparan <i>Perkembangan Perundingan WTO Pasca KTM Bali disampaikan oleh Direktur Kerja Sama Multilateral Kementerian Perdagangan</i>, menghasilkan kesepakatan pada Isu <i>Trade Facilitation</i> serta kemajuan pada beberapa elemen pertanian, (public competition) dan pembangunan (monitoring mechnism dan LDC issues). Disampaikan 3 komponen penting dalam perundingan pertanian yaitu : akses pasar, domestic support dan export competition.</li> <li>2. Paparan <i>Daya Saing Industri Minyak Sawit Indonesia disampaikan oleh Ketua Umum GAPKI</i> menyampaikan beberapa point antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri minyak sawit memiliki peran penting dan strategis dalam ekonomi nasional sebagai penghasil devisa terbesar, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan dan mendorong ekonomi daerah. Wajar jika dideklarasikan minyak sawit sebagai industry strategis nasional.</li> <li>- Indonesia memiliki daya saing yang tinggi dalam menghasilkan minyak sawit dan produk turunan. Minyak sawit merupakan komoditas yang paling produktif dan efisien, dan kelapa sawit merupakan komoditas yang telah menguntungkan disbanding komoditas lain</li> </ul> </li> </ol>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan perkebunan kelapa sawit sudah semakin baik dan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan. Komitmen pemerintah dan pelaku usaha untuk menerapkan prinsip pengelolaan perkebunan kelapa sawit sangat tinggi.</li> <li>- Kritik terhadap minyak sawit lebih didorong oleh persaingan dagang dari minyak nabati lainnya dan hambatan yang dilakukan oleh Negara-negara penghasil minyak nabati lain dilakukan untuk melindungi industri minyak nabati domestik.</li> </ul> <p>3. Paparan Posisi Indonesia menghadapi MEA 2015 dan RCEP 2015 disampaikan oleh Direktorat ASEAN Kementerian Perdagangan dimana Peran Atase Pertanian dalam menghadapi MEA 2015 adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempertahankan dan meningkatkan share produk pertanian di Pasar Negara tujuan</li> <li>- Identifikasi dan Rekomendasi (1) <i>Non Tariff Measures (NTMs)</i>, (2) <i>Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures (STRACAP)</i>, (3) <i>Sanitary &amp; Phytosanitary Measures (SPS)</i>, dan (4) <i>Technical Barriers to Trade (TBT)</i>.</li> <li>- Mendorong investasi untuk peningkatan produksi <b>Produk Pertanian Strategis</b> Pertanian Strategis dan <b>Produk Pertanian bernilai tambah</b> (Karet, Kopi, Sawit, Manggis, Padi, Jagung, Kedelai, Gula dan Daging), Produk Mamin Olahan).</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong Investasi untuk pembangunan food estate (Kalbar, Kalteng dan Maluku)</li> <li>- Menggali potensi pasar untuk pertanian organic (Spices)</li> <li>- Kolaborasi pameran</li> </ul> <p>4. Paparan mengenai Mekanisme Pengelolaan Keuangan Atase Pertanian Perwakilan RI disampaikan oleh Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri menjelaskan beberapa point antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar Hukum</li> <li>- Pengelolaan anggaran di Perwakilan RI</li> <li>- Prosedur Atase Teknis di Perwakilan RI</li> <li>- Mekanisme Transfer UP/TUP Attani</li> <li>- Rekap pengiriman UP Attani</li> <li>- Mekanisme pengiriman sisa UP Attani</li> <li>- Uang Persediaan Awal Tahun</li> </ul> <p>5. Paparan System Pelaporan Keuangan disampaikan oleh Kepala Biro KP Kementerian Pertanian menjelaskan beberapa point antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem Akuntansi Instansi</li> <li>- Proses Bisnis Unit Akuntansi</li> <li>- Reviu atas Laporan Keuangan</li> <li>- Pernyataan Tanggung Jawab</li> <li>- Pengelolaan dan Penatausahaan BMN</li> <li>- Pelaporan BMN per 30 Juni 2015 untuk Pusat KLN Kementerian Pertanian</li> <li>- Atase Pertanian Tokyo, Brussel, Roma dan Washington</li> <li>- Catatan Atas Neraca BMN</li> <li>- Pemindahtangan BMN</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--

				<p>6. Paparan Atase Pertanian Tokyo, Washington, Brussel dan Tokyo</p> <p>Atani Tokyo. Peluang dan tantangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>adopsi berbagai teknologi pertanian melalui berbagai bidang pertanian,</li> <li>akses pasar produk-produk pertanian melalui peningkatan daya saing,</li> <li>mendorong investasi bersama di Indonesia melalui pemberian kemudahan perijinan dan penyiapan sarana dan prasarana,</li> <li>pengembangan kerjasama teknik: bilateral, regional, multilateral yang memiliki kesamaan keanggotaan.</li> </ol> <p>Target :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>meningkatnya ekspor produk pertanian khususnya hortikultura dan tanaman pangan Indonesia ke Jepang,</li> <li>meningkatnya investasi Jepang di Indonesia melalui joint investment dengan fokus komoditas pertanian berdaya saing tinggi yang dapat memenuhi pasar Jepang,</li> <li>meningkatnya jumlah petani magang yang berkualitas dan perbaikan penanganan program, sebagai salah satu upaya mempercepat alih teknologi dan etos kerja SDM pertanian.</li> </ol> <p>Atani Washington. Tupoksi dan peran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>observasi/market intelligent,</li> <li>meningkatkan kerjasama: ekspor (promosi), peluang investasi, pendidikan/pelatihan, penelitian/teknologi pertanian,</li> <li>fasilitasi penyelesaian masalah perdagangan.</li> </ol> <p>Atani Washington memiliki area kerja 50 negara bagian AS, 21 negara Amerika</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Selatan, dan Kanada. Beberapa komoditas unggulan AS – ekspor ke Indonesia: gandum, kedelai, jagung, kapas, pakan hewan, produk dairy, buah-buahan.</p> <p>Peluang peningkatan ekspor Indonesia ke AS: kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao-produk, rempah, the, ikan dan udang, mentega. Peluang dan potensi kerjasama Indonesia – AS :</p> <p>a. pengembangan ekspor komoditas pertanian, melalui partisipasi aktif pameran/ eksibisi/ ekspor produk pangan/pertanian,</p> <p>b. investasi. Beberapa bantuan proyek :  - <i>Millenium Challenge Cooperation</i> (MCC),  - <i>Mondelez International: Cocoa Life</i> Indonesia</p> <p>Atani Brussel. Bentuk kegiatan: pelayanan informasi dan data pertanian untuk kepentingan public; kerjasama luar negeri untuk mendukung sekr pertanian bidang pangan, secara bilateral dan multilateral. Strategi :</p> <p>a. pemetaan permasalahan (kualitas untuk memenuhi standar UE, kualitas untuk persaingan);</p> <p>b. promosi (<i>direct link</i>, branding, networking dengan KADIN asing);</p> <p>c. investasi <i>logistic</i> di pelabuhan UE;</p> <p>d. kerjasama (<i>triangle cooperation</i>); (v) <i>single market</i> ASEAN vs UE; (vi) publikasi riset – <i>scientific</i>.</p> <p>Atani Roma, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan :</p> <p>a. rencana pengembangan kerbau di Sumbawa</p>	
--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>b. rencana Pembukaan Pusat Pengelolaan minyak sawit di Malta, Napoli dan Genoa</li> <li>c. beberapa produk olahan komoditi pertanian di Malta</li> <li>d. rencana pertemuan tahun 2015</li> </ul>	
6.	27-28 Agustus 2015 di Wisma Bogor Indah Nirwana	Sosialisasi Mekanisme Pengelolaan Barang Milik Negara	Eselon I Lingkup Kementan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PMK 04/PMK.06/2014 tentang Pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dari Pengelola barang kepada Pengguna barang</li> <li>- PMK 246/PMK.06/2014 tentang tatacara pelaksanaan penggunaan Barang Milik Negara</li> <li>- PMK 104/PMK.06/2015 tentang perubahan kedua atas PMK 125/PMK.05/2011 tentang pengelolaan BMN berasal dari dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan sebelum TA 2011.</li> <li>- Pemusnahan dan penghapusan khusus untuk persediaan batasan untuk penghapusan/pemusnahan sesuai dengan PMK 50/PMK.06/2014.</li> </ul>	
7	3-31 Agustus 2015 Pusat KLN Kementan	Penugasan Pejabat/ Pegawai Kementan ke Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setneg RI</li> <li>2. Kemenlu</li> <li>3. Kedutaan Besar Negara terkait</li> <li>4. Eselon I lingkup Kementan</li> </ol>	Telah diproses penugasan pejabat / pegawai Kementan ke luar negeri sebanyak 119 orang yaitu mengikuti workshop/seminar sebanyak 27 orang, menghadiri pertemuan/siding sebanyak 57 orang, mengikuti pelatihan/training sebanyak 13 orang, melakukan kunjungan 19 orang, program S2 sebanyak 2 orang, program S3 sebanyak 1 orang	Berkas/dokumen perjalanan pejabat/pegawai ybs telah dikirim ke Setneg RI untuk memperoleh surat persetujuan Setneg RI & ke Kemenlu untuk memperoleh exit permit serta Kedutaan Besar terkait untuk memperoleh visa

